


LAPORAN PENELITIAN

Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pembangunan Daerah Berbasis *Smart City* di Kota Balikpapan



DISUSUN OLEH
Tim Peneliti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
Tahun 2021

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :

**PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS *SMART CITY* DI KOTA BALIKPAPAN**



OLEH :

Dr.H. Muhammad Noor, M.Si
Annafik Khamamim
Muhammad Arsyad
Arief Rahman

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pembangunan Daerah Berbasis *Smart City* di Kota Balikpapan

Peneliti

Ketua

Nama : Dr. H. Muhammad Noor M.Si
NIP : 19600817 198601 1 001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Anggota

Nama : Annafik Khamamim
NIM : 1802016025
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Nama : Muhammad Arsyad
NIM : 1802016017
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Nama : Arief Rahman
NIM : 1902018002
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000 (Dana PNBPN Fisip Unmul)

Samarinda, 09 Desember 2021

Koordinator Program Studi
Pascasarjana Fisip Unmul

Ketua Peneliti

Prof.Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Mengetahui,
Dekan Fisip Unmul

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Target Capaian Luaran	7
BAB II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN	8
2.1 Keterkaitan Penelitian dengan Implementasi Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	8
2.2 Target Capaian Penelitian	9
2.3 Luaran atau <i>Outcome</i> Penelitian	10
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	11
3.1 Penelitian Terdahulu	11
a. <i>Increasing Collaboration and Participation in Smart City Governance: a Cross Case Analysis of Smart City Initiatives</i>	11
b. <i>Smart City Governance: Exploring the Institutional Work of Multiple Actors Towards Collaboration</i>	11
3.2 Teori dan Konsep	12
a. <i>Collaborative Governance</i>	12
b. <i>Smart City</i>	17
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	20
4.1 Jenis Penelitian	20
4.2 Fokus Penelitian	20
4.3 Populasi dan Teknik Sampling	21
4.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	21
4.5 Teknik Pengumpulan Data	23
4.6 Teknik Analisis data	24
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26

5.2 <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	33
5.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83

Daftar Pustaka
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Capaian Luaran Penelitian	7
Tabel 2.1 Outcome Penelitian	10
Tabel 5.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di Kota Balikpapan ...	26
Tabel 5.2 Dasar Kebijakan Pengembangan Program <i>Smart City</i>	33
Tabel 5.3 Implementasi Pilar <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	36
Tabel 5.4 Analisis SWOT Berdasarkan Pilar <i>Smart City</i>	37
Tabel 5.5 Sasaran <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	41
Tabel 5.6 Tabel Infrastruktur TIK Kota Balikpapan	48
Tabel 5.7 Ruang Lingkup Pengembangan <i>Smart Branding</i> Kota Balikpapan	50
Tabel 5.8 Strategi Pengembangan <i>Smart Economy</i> Kota Balikpapan	54
Tabel 5.9 Strategi Membangun <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	58
Tabel 5.10 Strategi Pengembangan <i>Smart Environment</i>	61
Tabel 5.11 Desain Kelembagaan dalam Pengembangan <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	65
Tabel 5.12 Dewan Smart City Kota Balikpapan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Permasalahan & Tantangan Perkotaan	1
Gambar 3.1 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash	15
Gambar 3.2 Kota Masa Depan Indonesia : Kota Berkelanjutan Dan Berdaya Saing 2015 – 2045	17
Gambar 3.3 <i>Smart City Development Path</i>	18
Gambar 4.1 Model Interaktif	31
Gambar 5.1 Visi <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	35
Gambar 5.2 <i>Livability Index</i> Kota Balikpapan Tahun 2014	46
Gambar 5.3 Aplikasi TMC Kota Balikpapan	49
Gambar 5.4 Logo <i>City Branding</i> Kota Balikpapan	51
Gambar 5.5 Aplikasi Mobile Cinta Balikpapan	53
Gambar 5.6 Kerjasama DLH dengan PT. Pertamina dan Abadan Balikpapan Dalam Pengelolaan Sampah	63
Gambar 5.7 Penandatanganan Mou Antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Telkom	78

PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS *SMART CITY* DI KOTA BALIKPAPAN

Abstrak

Implementasi pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional. Smart City ditawarkan sebagai sebuah pendekatan solutif untuk mewujudkan tata kelola perkotaan yang berkelanjutan melalui kolaborasi ekosistem digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah kebijakan smart city Kota Balikpapan serta bagaimana tata kelola kolaboratif menuju visi Balikpapan Kota yang Nyaman dan Layak Huni.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara dengan berbagai informan yang memahami konteks penelitian tersebut serta studi dokumentasi melalui telusuran berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan smart city di kota Balikpapan merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Balikpapan yang dilakukan melalui akselerasi dan sinergi pembangunan daerah serta sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan. *The Most Livable City* merupakan visi smart city Kota Balikpapan yang dijabarkan menjadi 6 pilar *smart governance*, *smart environment*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living* dan *smart society*. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, korporasi, dunia usaha, serta media serta adanya interdependensi antar aktor kolaborasi merupakan prasyarat bagi keberhasilan *smart city* Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Pemerintahan Kolaboratif, *Smart City*, *Collaborative Governance*

GOVERNMENT COLLABORATIVE IN SMART CITY-BASED REGIONAL DEVELOPMENT IN BALIKPAPAN SMART CITY

Abstract

The implementation of sustainable development faces various issues and challenges that cannot be solved conventionally. Smart City is offered as a solution to approach and embody sustainable urban governance through digital ecosystem collaboration. The purpose of this study is to analyze the direction of the smart city policy of Balikpapan City and how collaborative governance towards the vision of Balikpapan as a Comfortable and Livable City.

This research was carried out using descriptive qualitative methods by conducting observations, interviews with various informants who understood the context of the research as well as documentation studies through various relevant sources to the research theme.

The results of the study indicate that the development of a smart city is a manifestation of the commitment by the local government of Balikpapan City which is carried out through the acceleration and synergy of regional development which is appropriate with the RPJMD of the city of Balikpapan. The Most Livable City is a smart city vision of Balikpapan City which is translated into 6 pillars of smart governance, smart environment, smart branding, smart economy, smart living, and smart society. The Penta Helix collaboration strategy between the government, education sector, corporations, the business world, and the media as well as the interdependence between collaborative actors is a prerequisite for the success of Balikpapan Smart City

Keywords: Government, Collaborative Governance, Smart City

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah saat ini memberikan perhatian secara khusus pada konsep pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan dan berbagai isu yang berkaitan dengan permasalahan daerah berkembang. Namun demikian, dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dihadapkan pada permasalahan global seperti pertumbuhan populasi penduduk yang terus meningkat, penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, peningkatan angka kriminalitas, pembengkakan tingkat penggunaan energi, penumpukan sampah, serta berbagai permasalahan sosial lainnya (Conoras dan Hikmawati, 2018)

Gambar 1.1 Permasalahan & Tantangan Perkotaan



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2015

Dalam artikel yang diulasnya, Guimaraes et al (2019) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dan ini diperkuat dari laporan yang dikemukakan oleh *United Nations* bahwa tahun 2018, 55% penduduk dunia menghuni pusat kota dan ada kecenderungan mengalami peningkatan dalam beberapa dekade mendatang. Hal tersebut berimplikasi pada proses adaptasi kota dalam memenuhi kebutuhan minimum masyarakatnya.

Para ahli mengemukakan bahwa berbagai tantangan dan permasalahan perkotaan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat konvensional. *Smart city* ditawarkan sebagai sebuah pendekatan solutif untuk mewujudkan sebuah kota yang berkelanjutan melalui penerapan kolaborasi ekosistem digital dalam menanggulangi permasalahan tersebut (Coronas dan Hikmawati, 2018).

Konsep kota pintar dapat menjadi sebuah ide yang fundamental dan motivator untuk pengembangan kebijakan yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Basis dari konsep kota pintar ini merupakan sebuah rangkaian kombinasi modal manusia, modal sosial dan informasi dengan menggunakan infrastruktur teknologi komunikasi untuk menghasilkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat (Guimaraes et al, 2019).

Di Indonesia, konsep pengembangan kota cerdas mulai didiskusikan secara serius pada acara konferensi *e-Indonesia initiative* (eII) dan *smart*

indonesia initiatives (SII) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2015. Arah pengembangan konsep kebijakan *smart city* didasarkan kebijakan pengembangan perkotaan nasional dan agenda untuk mencapai *sustainable development goals* (SDG's), dimana salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan kota sebagai tempat tinggal yang layak huni, bersifat inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (Bappenas, 2015).

Tren penggunaan konsep *smart city* kemudian dimulai dengan adanya inisiasi gerakan menuju *smart city* oleh pemerintah dengan Kominfo sebagai corong utamanya. Saat ini berbagai kabupaten dan kota di Indonesia mulai menyematkan *smart city* dalam proses pengembangan kotanya dan menjadikan konsep tersebut sebagai pedoman dalam mengelola dan *branding* kota (Perdana, 2020)

Kota Balikpapan, merupakan kota kedua terbesar di Kalimantan Timur dan merupakan pusat perekonomian terbesar se Kalimantan. Pada tahun 2019, Kota Balikpapan terpilih menjadi salah satu daerah yang menerapkan gerakan 100 *smart city*. Pemerintah daerah setempat mulai mengkaji sejumlah rencana untuk mendukung gerakan *smart city* di kota Beruang Madu tersebut. Kajian dalam perencanaan *smart city* bertujuan untuk menggali informasi mengenai kesiapan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan *smart city*, seperti sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran aplikasi, kondisi infrastruktur dan suprastruktur *smart city* serta komitmen kepala daerah (Maulana, 2019).

Program Balikpapan *Smart City* dimulai dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan dalam empat tahap. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait penetapan Balikpapan sebagai salah satu dari 100 kota yang mengusung konsep tersebut. Hasil dari bimbingan teknis tersebut diantaranya adalah pembentukan dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*; perumusan dokumen penunjang *smart city*, seperti analisis strategis *smart city*, *masterplan smart city* dan *executive summary smart city*; serta penandatanganan komitmen bersama dukungan pelaksanaan program *smart city* oleh seluruh perangkat daerah di Kota Balikpapan (diskominfo.balikpapan.go.id).

Dokumen *smart city* disusun dengan tujuan untuk merepresentasikan analisa lintas sektor, pemodelan dan simulasi kebijakan serta mekanisme penyampaian komunikasi kepada seluruh *stakeholders* untuk memudahkan proses kerjasama. Dalam hal ini, visi *smart city* kota Balikpapan adalah *Balikpapan The Most Livable City* dengan berbasis pada indikator *smart living*, *smart society*, *smart branding*, *smart governance*, *smart economy*, dan *smart environment*. Fokus utama dalam program *smart city* kota Balikpapan adalah membangun sinergi menuju kota cerdas berwawasan lingkungan (PPT Balikpapan *Smart City*, Hasil Pelaksanaan Penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan, 2019)

Dalam penerapannya, konsep kota cerdas mensyaratkan penggunaan sistem teknologi komunikasi dan informasi dalam tata kelola sehari-hari.

Dalam hal ini, keberlangsungan program sangat bergantung pada kolaborasi seluruh aktor yang juga menjadi penerima manfaat dalam program tersebut, yaitu seluruh elemen masyarakat. Terdapat setidaknya tiga hal yang menjadi tantangan penerapan konsep *smart city*, yaitu teknologi, sumber daya manusia, dan pemerintahnya. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim kolaboratif untuk menghadapi tantangan tersebut (Sanjaya et al, 2018).

Pendekatan *collaborative governance* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat upaya bersama pemangku kepentingan dan *non-state* untuk bekerjasama dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik mengelola program publik atau aset publik (Islamy, 2018). Dalam konteks Balikpapan *Smart City*, sebuah ekosistem yang mendukung sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi warga, mengedukasi kemunculan inovasi dan bisnis model *start-ups*, untuk mendorong kerjasama antara sektor publik dan privat dalam realisasi visi dari *smart city* (Tan dan Taeihagh, 2020)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aktor kolaborasi dalam pembangunan daerah berbasis *smart city* di Kota Balikpapan?
2. Bagaimana arah kebijakan *smart city* di Kota Balikpapan?
3. Bagaimana tata kelola kolaboratif dalam pembangunan daerah berbasis *smart city* di Kota Balikpapan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan tentang aktor kolaborasi dalam pembangunan daerah berbasis *smart city* di Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai rencana kebijakan *smart city* Kota Balikpapan.
3. Untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap tata kelola kolaboratif dalam pembangunan daerah berbasis *smart city* di Kota Balikpapan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah melalui perspektif *governance collaborative* dan *smart city*.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota Balikpapan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan benefit bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kolaborasi dengan berbasis pada pendekatan partisipatif dengan berbagai stakeholders untuk mencapai tujuan pembangunan kota berbasis *smart city*.

Bagi Berbagai Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan

Penelitian ini dapat memberikan referensi dan membuka wawasan mengenai pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat di Kota

Balikpapan dalam mewujudkan program pembangunan daerah menuju *sustainable city* berbasis kota cerdas.

1.5 Target Capaian Luaran

Tabel 1.1
Target Capaian Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran				Indikator Pencapaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS	TS+1	TS+2
1.	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal 2)	Internasional bereputasi		√		√	
		Nasional Terakreditasi	√		√		
2.	Artikel Ilmiah dimuat di Prosiding 3)	Internasional Terindeks		√		√	
		Nasional	√		√		
3.	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah 4)	Internasional					
		Nasional	√		√		
4.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten					
		Paten Sederhana					
		Hak Cipta					
		Merek Dagang					
		Rahasia Dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
5.	Teknologi Tepat Guna 7)						
6.	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial 8)						
7.	Bahan Ajar 9)	√			√		
8.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 10)						

BAB II

RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN

2.1 Keterkaitan Penelitian dengan Implementasi Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Keterkaitan yang mendasar antara penelitian dan implementasi visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat relevansi antara riset dengan implementasi visi Fisip untuk menjadi fakultas yang berdaya saing melalui pengembangan berbagai riset dibidang ilmu sosial. Objek penelitian ini adalah peran aktor kolaboratif dalam pembangunan daerah berbasis smart city di Kota Balikpapan. Peneliti ingin mengkaji bagaimana arah kebijakan smart city dan kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk keberhasilan program tersebut di Kota Balikpapan. Pendekatan collaborative governance menurut Ansel & Gash digunakan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini.
2. Riset ini mendukung tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk meningkatkan kualitas penelitian (dosen dan mahasiswa) yang produktif, kreatif dan inovatif. Penelitian ini dilakukan oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa dari Magister Ilmu Administrasi Publik dengan target luaran adalah jurnal baik nasional maupun internasional.
3. Riset sesuai dengan misi Fakultas untuk memperkuat penelitian dan pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan evaluasi

pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

2.2 Target Capaian Penelitian

Penelitian dengan tema besar “Pemerintahan Kolaboratif dalam Pembangunan Daerah Berbasis Smart City di Kota Balikpapan” ini dilakukan oleh tim peneliti dari Magister Ilmu Administrasi Publik. Peta jalan penelitian direalisasikan berdasarkan bidang kajian yang ditetapkan oleh Program Studi. Penelitian ini termasuk dalam bidang kajian Ilmu Administrasi Publik dan implementasi kebijakan publik. Target capaian penelitian ini adalah:

- a. Secara Kuantitatif : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi untuk keperluan studi dan kajian akademik ilmu administrasi publik dan implemetasi kebijakan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan secara kuantitatif akan banyak dosen atau mahasiswa menjadikan penelitian ini sebagai *trigger* untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang kajian yang serupa.
- b. Secara Kualitatif : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmu administrasi publik, baik secara teoritik maupun praktik. Secara teoritik penelitian ini dapat memperkaya kajian, serta memperdalam penggunaan teori dan konsep *collaborative governance* dan aplikasinya pada bidang pemerintahan. Pada tataran praktik, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam pengembangan kota yang berkelanjutan dan berkejahteraan berbasis pada kolaborasi masyarakat. Sementara bagi masyarakat daerah

setempat dapat memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah menuju visi misi Kota Cerdas yang berkelanjutan.

2.3 Luaran atau Outcome Penelitian

Tabel 2.1
Outcome Penelitian

Nama Jurnal / Instansi	Skor Jurnal	Rencana Publikasi (Tahun)
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) / Universitas Gajah Mada	Sinta 2	2021/2022
Jurnal Borneo Administrator / Lembaga Administrasi Negara	Sinta 2	2021/2022
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan (Administratio) / Universitas Lampung	Sinta 4	2021/2022
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (JPPUMA)	Sinta 3 & Terindex DOAJ	2021/2022
Public Policy and Administration	Q2 / Publisher: Sage	2021/2022

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Penelitian Terdahulu

a. *Increasing Collaboration and Participation in Smart City Governance: a Cross Case analysis of Smart City Initiatives (2017)*

Penelitian ini dilakukan oleh Gabriela Viale Pereira, Maria Alexandra Cunha, Thomas J. Lampoltshammer, Peter Parycek & Maurício Gregianin Testa yang dipublikasikan pada jurnal *Information Technology for Development* pada tahun 2017. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam konteks kota pintar.

Fokus penelitian berada pada fenomena kolaborasi dan partisipasi pada domain *smart city* di tiga kota di Brazil, yaitu Rio de Janeiro, Porto Alegre dan Belo Horizonte. Analisis empiris dilakukan untuk mengusahkan bagaimana ICT dapat mendorong tata kelola kolaboratif serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dalam pemerintahan. Dalam temuan hasil penelitian dikemukakan bahwa ICT memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung integrasi informasi antar lembaga pemerintah, pemangku kepentingan eksternal, dan seluruh warga negara khususnya di negara berkembang.

b. *Smart City Governance: Exploring the Institutional Work of Multiple Actors Towards Collaboration (2019)*

Penelitian ini dilakukan oleh Laura Broccardo Francesca Culasso serta Sara Giovanna Mauro yang dipublikasikan di *International Journal of Public*

Sector Management pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemerintah lokal berupaya untuk menitikberatkan pengembangan kebijakan dan inisiatif yang dirancang untuk menjadikan sebuah kota menjadi *smart city*. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tekanan dan permasalahan kota untuk mendorong efektivitas, keberlanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peneliti menyelidiki mengenai pentingnya Tata kelola melalui pemerintahan kolaboratif perlu dibangun untuk mengembangkan kota cerdas.

Desain penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pengalaman kota pintar di utara Italia. Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi kerja institusional banyak aktor kolaborasi dan pengaruhnya terhadap tata kelola kota pintar.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dikemukakan bahwa kolaborasi dianggap sebagai suatu yang penting untuk mencapai kota cerdas selama desain dan tahap implementasi sekaligus menghasilkan tantangan baru yang harus diatasi dengan integrasi politik, teknis dan khususnya pekerjaan budaya dari para aktor kolektif yang terlibat.

3.2 Teori dan Konsep

a. *Collaborative Governance*

Selama beberapa dekade ini, para ahli mengamati adanya reformasi dalam sektor publik yang mengalami pergeseran dari *administrative state* menuju *new governance* (Majona, 1997; Osborne, 2006; Salamon, 2002). Reformasi tersebut mengakibatkan adanya kemunculan bentuk

pemerintahan baru menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Islamy, 2018)

Collaborative governance merupakan sebuah strategi baru dalam bidang pemerintahan yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga publik didalam suatu forum resmi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus (Ansell and Gash 2007). Mengutip definisi yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008) dalam Islamy (2009) dikemukakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik.

Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya maupun jaringan yang dimiliki mendorong pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. *Collaborative governance* lahir sebagai respon atas kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik (Kurniadi, 2020).

Terdapat enam kriteria dalam *collaborative governance* menurut ansell dan Gash (2008), yaitu forum diinisiasi oleh lembaga publik; peserta

forum termasuk aktor *non-state*; partisipan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebatas konsultasi; forum bersifat resmi; tujuan forum adalah untuk mencapai sebuah consensus; Fokus pada kolaborasi dalam pembuatan kebijakan publik dan manajemen publik.

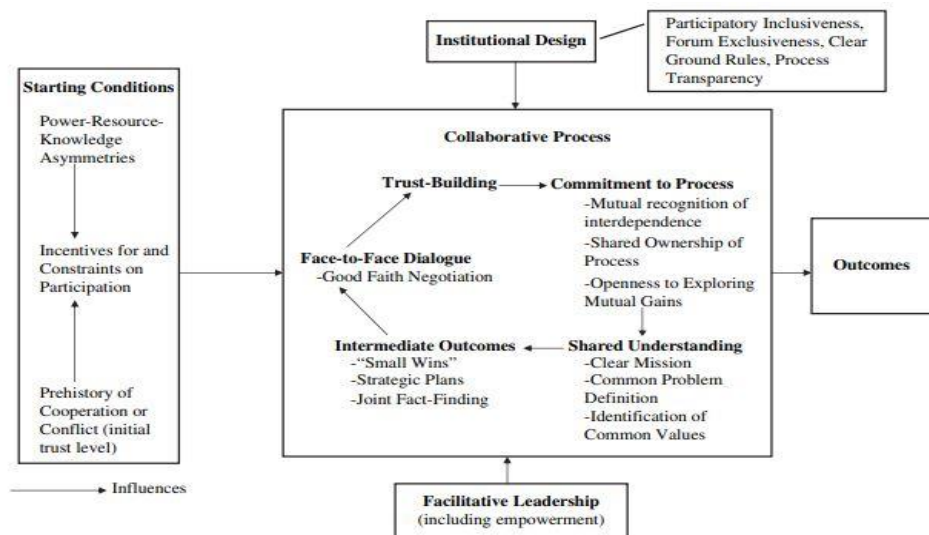
Sebagai sebuah bentuk tata kelola publik gaya baru, terdapat beberapa nilai dasar yang menjadi karakteristik dalam *collaborative governance* (Kurniadi, 2020) yaitu:

1. Orientasi konsensus. Konsensus merupakan kebutuhan mendasar dalam kolaborasi multi sektor. Hubungan berbasis kolaborasi rentan terhadap konflik sehingga consensus menjadi hal yang harus dikedepankan.
2. Kepemimpinan Kolektif. Aspek kepemimpinan menjadi nilai dasar beranjak dari pemahaman bahwa inti manajemen dan tata kelola adalah kepemimpinan. Hubungan berbagai pihak yang terlibat berada pada posisi yang sama dan berada pada fungsi koordinasi disbanding fungsi komando.
3. Komunikasi Multiarah. Komunikasi menjadi salah satu proses inti dalam kolaborasi. Komunikasi multiarah mensyaratkan adanya umpan balik yang berlangsung dengan melibatkan lebih dari dua pihak secara berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi.
4. Berbagi Sumber Daya. Sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia, keuangan serta sumber daya lainnya yang dapat memperkuat aktivitas kolaborasi dalam kebijakan publik. Berbagi sumber daya

merupakan salah satu penopang dalam penerapan tata kelola kolaboratif.

Penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* menurut Chris Ansell dan Alison Gash (2007). Terdapat beberapa indikator dalam menjelaskan *collaborative governance*, yaitu sebagai berikut (Ansell & Gash, 2007):

Gambar 3.1
Model Collaborative Governance Ansell & Gash



Sumber: Ansell & Gash, 2007

Dalam model yang dikemukakan Ansell and Gash, variabel proses kolaboratif dikemukakan dalam gambar 4.1 dimana proses tersebut diawali dengan pemetaan terhadap kondisi awal, desain kelembagaan kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi.

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Proses ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat *power-resources-knowledge asymmetric* atau kesenjangan yang sangat tinggi

dalam kekuasaan dan kekuatan, sumber daya, pengetahuan atau insentif serta kendala untuk berpartisipasi diantara berbagai pihak yang akan melakukan proses kolaborasi.

2. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Proses ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, berbagai aturan dasar yang mendukung proses kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.

3. *Fasilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif berperan untuk memastikan integritas dalam membangun consensus. Mediasi meningkatkan peran pihak ketiga dalam merinci substansi dalam proses negosiasi ketika terjadi ketidakefektifan pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Kolaborasi merupakan sebuah proses pengembangan yang bertahap. Proses kolaboratif merupakan sebuah siklus yang seringkali bergantung pada pencapaian siklus yang baik diantara berbagai dimensi. Dalam model yang dikemukakan Ansell dan Gash proses kolaborasi dijabarkan dalam berbagai hal, yaitu adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan bersama, komitmen kuat pada proses kolaborasi, berbagi pemahaman bersama, dan mendapatkan capaian minimal sebagai hasil dari proses kolaborasi.

b. *Smart city*

Berbagai perkotaan diseluruh dunia bergerak menuju ruang perkotaan yang lebih cerdas (*smart city*) melalui pemanfaatan teknologi tinggi dalam menghadapi berbagai permasalahan krusial terkait kehidupan perkotaan seperti masalah lalu lintas, polusi, kepadatan penduduk, kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya. Kementerian PPN/ Bappenas mengusung beberapa prinsip kota masa depan melalui pembangunan kota yang berkelanjutan 2015-2045 yang berdasarkan pilar (1) kota layak huni, aman dan nyaman (2) kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; dan (3) kota cerdas dan berdaya saing serta berbasis teknologi dan budaya(mencakup perekonomian, tata kelola, insfrastruktur, lingkungan, masyarakat dan hunian) (Djunaedi et al, 2018).

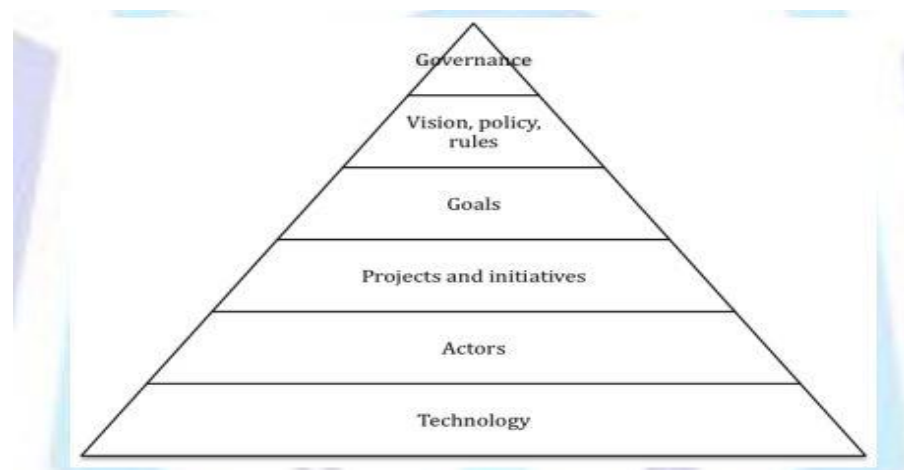
Gambar 3.2



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2015

Smart city bukan hanya sebuah fenomena yang bersifat *top-down*, namun fenomena ini juga harus diperhatikan dalam konteks sifat *bottom-up*. Proses *top-down* muncul dari sebuah strategi dalam pencapaian visi dari *smart city* dan dikembangkan penerapannya berdasarkan aturan dan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama yang dinyatakan sejak awal. Gambar 3.2 berikut ini mendeskripsikan bagaimana jalur kelahiran pengembangan dan konsolidasi pengembangan *smart city* secara *top-down* dan *bottom-up* (Dameri, 2013):

Gambar 3.3
Smart City Development Path



Sumber: Dameri, 2013

Berdasarkan gambar 3.3 tentang jalur pengembangan kota cerdas secara *bottom-up* dapat dikemukakan bahwa teknologi (terutama ICT) merupakan penggerak utama kelahiran dan pengembangan konsep *smart city*. Teknologi tersebut dapat menghubungkan berbagai aktor kolaborasi di areal perkotaan dan juga untuk memasok layanan digital bagi lembaga publik dan swasta yang berkolaborasi.

Aktor utama yang berperan sebagai penggerak pertama dalam pengembangan *smart city* adalah universitas, lembaga penelitian dan perusahaan telekomunikasi dan teknologi. Aktor tersebut mengembangkan ide kota cerdas melalui kompetensi yang dimilikinya untuk merancang sebuah pendekatan solutif dalam mendukung kehidupan perkotaan yang lebih baik dalam sebuah inisiatif atau gagasan, karya, atau inovasi program.

Visi *smart city* harus didefinisikan secara komprehensif dengan mempertimbangkan visi strategis kota, kekhususan budaya, geografis dan ekonomi masing-masing perkotaan, wilayah serta objektif khusus dari program tersebut. Jalur pengembangan *smart city* tidak dapat mengabaikan tata kelola sebagai aktivitas yang penting untuk memberikan keberhasilan inisiatif pengembangan tata kota. Visi *smart city* harus dibangun melalui proses bersama, melibatkan semua pemangku kepentingan dengan berdasar pada kebijakan dan aturan untuk mencapai tujuan bersama.

Subjek terpenting dalam pengembangan smart city adalah pada warga masyarakatnya. Inisiatif *smart city* bukan hanya menitikberatkan pada kesuksesan pengelolaan kota dengan menggunakan teknologi, tetapi bagaimana penggunaan teknologi dapat menciptakan *value* bagi masyarakatnya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul Pemerintahan Kolaboratif dalam Pembangunan Daerah Berbasis *Smart City* di Kota Balikpapan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dari sebuah fenomena atau peristiwa atau isu tertentu (Satori dan Komariah, 2014). Riset kualitatif bersifat *natural setting* dengan desain penelitian yang tidak dapat ditentukan secara baku dan kaku serta fokus penelitian yang akan dieksplorasi secara komprehensif oleh peneliti.

4.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini, dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Peran berbagai aktor Kolaborasi dalam pembangunan daerah berbasis *smart city* di Kota Balikpapan.
- b. Rencana Kebijakan *smart city* Kota Balikpapan
- c. Tata kelola kolaboratif Pembangunan daerah berbasis *smart city* Kota Balikpapan yang terdiri dari proses orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah serta berbagi sumber daya

4.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi merupakan keseluruhan situasi sosial berdasarkan fokus penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Kota Balikpapan menuju kota cerdas berkelanjutan. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian (Amiruddin, 2016). Pada penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria informan kunci adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan smart city Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam SK Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan.
- b. Pihak-pihak yang mengikuti perkembangan program smart city Kota Balikpapan dimulai dari proses perencanaan, perumusan kebijakan,, sampai pada implementasi dan evaluasi smart city.

4.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Peneliti akan menggunakan narasumber penelitian dengan mengacu pada hasil pengamatan atas tindakan dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh tim peneliti (Ibrahim, 2015). Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dari berbagai informan yang memahami tentang pengembangan smart city Kota Balikpapan. Adapun informan tersebut

adalah pemerintah daerah Kota Balikpapan sebagai aktor utama dalam setiap program pembangunan daerah, dalam konteks ini adalah pengembangan Balikpapan smart city. Dalam hal ini, peneliti menetapkan beberapa pihak yang akan menjadi informan kunci, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

1. Ibu Raihanah (Kabag E-Gov Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan).
2. Ibu Juni Yastutik (Kasi E-Gov Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan).
3. Ibu Murni (Sekretaris Bappedalitbang Kota Balikpapan)
4. Bapak Didik Budiyanto (Kasi Data dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan)
5. Bapak Heryanto (Kasi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan)
6. Bapak Muhammad Ali Ichwani (Kabid Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappeda Kota Balikpapan)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian berupa dokumen, gambar, simbol buku atau jurnal ilmiah yang digunakan untuk memperkuat data primer. (Satori dan Komariah, 2014). Peneliti menggunakan beberapa sumber seperti buku, dokumen terkait, jurnal

ilmiah, berbagai berita baik di media konvensional maupun media online, foto, tabel dan gambar untuk membantu peneliti dalam memperkuat hasil penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder juga sebagai upaya untuk melakukan penelusuran berita yang didasarkan hasil observasi, serta wawancara dengan berbagai informan penelitian. Karena peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung kepada informan pendukung seperti media, akademisi, komunitas dan swasta, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelusuran melalui berbagai sumber berita yang akurat.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan *field work research* (penelitian lapangan) dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi:

a. Observasi

Observasi penelitian akan dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian sehingga peneliti mampu mencatat serta menghimpun data yang diperlukan untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian yang ditetapkan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan pengamatan terhadap isu yang diangkat menjadi objek penelitian dan melihat perkembangan yang terjadi dilapangan terkait isu pengembangan smart city Kota Balikpapan (Bungin, 2007).

b. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini, *depth interview* atau wawancara mendalam sangat diperlukan dengan pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang terdiri dari peran aktor kolaborasi, arah kebijakan serta tata kelola kolaboratif dalam pembangun daerah berbasis smart city di Kota Balikpapan. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada beberapa pihak yang menjadi informan kunci dan informan pendukung pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumen sebagai sumber informasi pendukung dapat berupa rekaman kejadian masa lampau, foto, surat, berbagai media *house journal* yang didapat selama proses penelitian berlangsung.

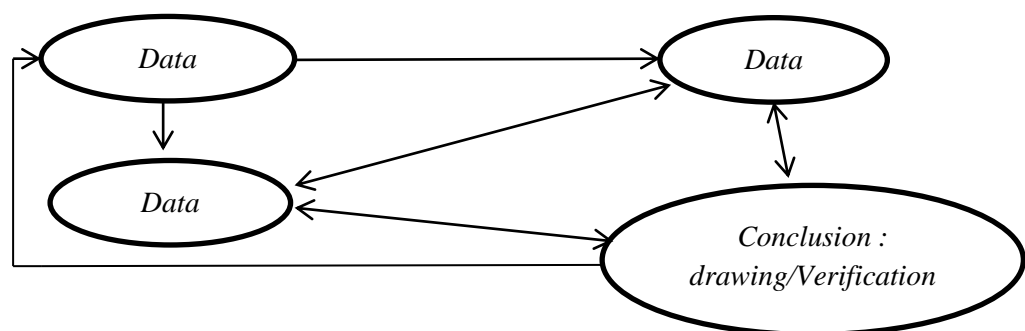
4.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan *interactive model* menurut Miles & Huberman (1992) dalam Satori dan Komariah (2014).

Penggambaran analisis data dapat dilihat berdasar gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1

Interactive Model



Sumber : Satori & Komariah, 2014

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan dengan metode observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Berbagai data yang diperoleh selama proses penelitian akan direduksi, dirangkum, dan dipilih. Proses mereduksi data ini dilakukan untuk dapat menjawab tujuan penelitian dengan data yang berkualitas.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk data deskripsi, grafik, tabel dan sejenisnya. Penyajian data berfungsi untuk memudahkan peneliti dan pembaca karya ilmiah dalam memahami isi penelitian.

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Tahap akhir dari penelitian kualitatif adalah dengan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan ini bisa saja menjawab rumusan masalah, namun bisa saja tidak menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang didukung data-data yang valid maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan verifikasi yang kredibel.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balikpapan merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Luas wilayah Kota Balikpapan secara keseluruhan adalah 503,330 km². Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kota Balikpapan Secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan terluas yaitu 179,93 km² dan Balikpapan Kota merupakan kecamatan dengan luas terkecil 10,20 km², hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 5.1
Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan
Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah
1	Balikpapan Timur	Manggar	4	137,14
2	Balikpapan Barat	Margasari	6	179,93
3	Balikpapan Utara	Muara Rapak	6	132,15
4	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ilir	6	11,05
5	Balikpapan Selatan	Sepinggan	7	37,78
6	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	5	10,20
Kota Balikpapan			34	503,3

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021

Letak geografis Kota Balikpapan berada pada posisi 116,5° Bujur Timur 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kutai Kertanegara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Panajam Paser Utara

Balikpapan merupakan kota yang memiliki perekonomian terbesar di Kalimantan dengan total PDRB mencapai 76,65 triliun pada tahun 2016. Kota ini berkembang pesat dengan masuknya berbagai perusahaan multinasional yang berdampak pada pesatnya pertumbuhan perekonomian Kota Balikpapan. Kota Balikpapan dikenal sebagai “Kota Minyak” karena perkembangan produksi minyak sebesar 260 ribu per barel per hari. Perkembangan industri minyak inilah yang menjadikan Balikpapan sebagai sebagai kota industri. Pada perkembangannya, Balikpapan tidak lagi berorientasi pada pengeboran minyak, namun lebih pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah di sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggian, Handil Bekapai, Sanga-Sanga, Tarakan, Bunyu, dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

5.1.1 Potensi Keunggulan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 dikemukakan mengenai rencana komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan seluas 84,686.84 ha. Komposisi penggunaan lahan ini meliputi kawasan lindung

seluas 33.940,07 ha dan kawasan budidaya seluas 50,746.76 yang kemudian dimanfaatkan untuk:

- a. Kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan bawahan, kawasan perlindungan setempat, kawasan RTH kota, kawasan suaka alam, pedestrian alam dan cagar budaya, kawasan jalur migrasi satwa, serta kawasan konservasi pesisir dan laut.
- b. Kawasan Budidaya yang meliputi kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan peruntukan pelayanan umum, serta kawasan pendidikan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut dan udara nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 guna menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Kota Balikpapan berperan sebagai Kota Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi sebagai Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, dan Pusat pengolahan migas.

a. Potensi Industri

Potensi kawasan industri kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti: shipdocking (dok perbaikan kapal), sparepart dibidang marine, *supply base* dan sebagainya.

b. Potensi Sektor Jasa dan Perdagangan

Sektor Jasa dan Perdagangan dalam beberapa tahun ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Balikpapan. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Pelabuhan Laut Semayang, Kilang Minyak Pertamina, Kawasan Industri Kariangau

(KIK) yang dilengkapi pelabuhan peti kemas dan rencana pembangunan costal area sehingga dapat mendukung perkembangan sektor jasa dan perdagangan.

c. Potensi Pariwisata

Kota Balikpapan sangat potensial untuk menjadi kawasan wisata Hutan lindung dan kawasan Cagar Alam. Hal ini didukung dengan topografi Balikpapan yang didominasi perbukitan dengan tutupan hutan yang cukup luas. Selain itu kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga menjadi objek atraksi wisata yang menarik pengunjung, yaitu adanya berbagai wisata pantai.

Pariwisata yang menonjol di Kota Balikpapan dapat digolongkan menjadi 2 obyek, yaitu pariwisata alam dan pariwisata buatan, dimana jumlah pariwisata buatan lebih banyak dibandingkan dengan pariwisata alam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pantai Melawai
- b. Pantai Lamaru
- c. Pantai Manggar
- d. Pantai POLDA / Pantai Kemala
- e. Penangkaran buaya teritip
- f. Taman bekapai
- g. MONPERA
- h. Hutan lindung sungai wain
- i. Agro wisata KM-23

- j. Wana wisata KM-10
- k. Hutan mangrove margomulyo
- l. Pasar inpres kebun sayur
- m. Water park regency
- n. Tugu jepang dan makam Jepang
- o. Mangrove teritip
- p. Water park ringroad
- q. Tugu Australia
- r. Museum Kodam VI Mulawarman
- s. Jembatan ulin kariangau
- t. Kampung atas air marga sari
- u. Ruko bandar
- v. Palm hill galery
- w. Kebun raya Balikpapan
- x. Pantai angkasa lanud Balikpapan

5.1.2 Aspek Perekonomian Kota Balikpapan

Secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Balikpapan masih didominasi sektor usaha berbasis sumber daya alam, yaitu industri pengolahan (migas). Industri pengolahan ini memberikan kontribusi sebesar 46,04%, lapangan usaha konstruksi (15,84%), lapangan usaha transportasi dan pergudangan (12,48%), serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (8,95%) (Draft Masterplan Smart City Kota Balikpapan. 2019). PDRB merupakan

indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah (BPS Kota Balikpapan, 2021)

Secara dominan, sektor industri pengolahan (migas) di Balikpapan masih menopang stabilnya pertumbuhan ekonomi Balikpapan. Namun demikian, Balikpapan secara bertahap berusaha mengalihkan ketergantungan yang sangat kuat pada sektor pertambangan tersebut dan mendorong tumbuhnya sektor utama lainnya, seperti konstruksi dan perdagangan. Oleh sebab itu, dalam visi jangka panjang pembangunan smart city diarahkan pada pembangunan kota jasa industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya (Draft *Masterplan Smart City Kota Balikpapan*, 2019)

5.1.3 Aspek Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah penduduk Kota Balikpapan adalah 704.110 Jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki 359.860 dan perempuan 344.250 (Data Juni 2021, Hasil Musrembang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026). Balikpapan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Balikpapan yang didasarkan pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi mengalami peningkatan semakin membaik. Sejak tahun 2013-2017, IPM Kota Balikpapan mengalami kenaikan 1,48 poin dalam jangka waktu 5 tahun.

Nilai IPM ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang hanya sebesar 75,12 maupun nasional 70.81 (BPS Kota Balikpapan, 2021)

5.2 *Smart City* Kota Balikpapan

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan berbagai kebijakan dan Peraturan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021. Kebijakan-kebijakan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengembangan strategi dan program pembangunan daerah yang berkelanjutan serta sebagai arah pembangunan smart city Kota Balikpapan. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui mengenai dasar kebijakan pengembangan *smart city* Kota Balikpapan:

Tabel 5.2
Dasar Kebijakan Pengembangan Program *Smart City*

No	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Sudah diterapkan/ Belum	Jenis kebijakan
1	8 Tahun 2011	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016	sudah	Peraturan Daerah
2	1 Tahun 2013	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025	sudah	Peraturan Daerah
3	188.4594/ 2013	Penetapan Bluenprint <i>e-Government</i> Bidang Aplikasi Pemerintah Kota Balikpapan	Sudah	Keputusan Wali Kota
4	18. 45-234/ 2015	Tim Pengembangan dan Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Sudah	Keputusan Wali Kota

5	065/327/Org/V II/2012	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ramah Lingkungan (<i>Green Information and Communications Technology</i>) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Sebagian	Surat Edaran
6	65/442/Org/XII /2011	Pemanfaatan Program Komputer Legal	Sebagian	Surat Edaran
7	12 Tahun 2016	Penyelenggaraan <i>e-Government</i>	sebagian	Peraturan Walikota
8	13 Tahun 2016	Penyelenggaraan Jasa Internet	sebagian	Peraturan Walikota
9	2 tahun 2017	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika		Peraturan Daerah
10	-	Penetapan Blueprint <i>Smart Governance</i> Menuju <i>Smart City</i>	Sebagian	SK Walikota (Proses penomoran di Bagian Hukum)
11	-	Penetapan Cetak Biru SPBE 2019-2023	Belum	SK Walikota

Sumber: Draft Analisis Strategi *Smart City* Kota Balikpapan, 2021

Konsep *smart city* Kota Balikpapan harus selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021. Fokus pembangunan jangka panjang ini diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah yang ditopang berbagai keunggulan dan kemandirian daerah. Visi *Smart City* adalah “Balikpapan Kota yang Nyaman dan Layak Huni” dan diharapkan dapat selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan dan menjadi inspirasi inovasi pengembangan Kota Cerdas di Kota Balikpapan. Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah “ Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan

menuju Madinatul Iman”. Sementara itu, misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Gambar 5.1 Visi *Smart City* Kota Balikpapan



Sumber: Draft *Executive Summary Master Plan Smart City* Kota Balikpapan, 2020

Pengembangan program *smart city* kota Balikpapan memiliki mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan berbagai stakeholders yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pendukung pencapaian target *smart city*.

Namun demikian, terdapat gap antara potensi, kesiapan dan kondisi riil kota Balikpapan pada saat ini. Hal ini merupakan tantangan dalam pencapaian 6 pilar *smart city* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Tabel berikut ini menjelaskan mengenai analisis SWOT dalam implementasi 6 pilar *smart city* Kota Balikpapan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3 Implementasi Pilar *Smart City* Kota Balikpapan

NO	Pilar Smart City	Visi RPJMD	Misi RPJMD
1	<i>Smart Governance</i>	Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2	<i>Smart Economy</i>	Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
3	<i>Smart Environment</i>		Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
4	<i>Smart Living</i>	Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif
5	<i>Smart Branding</i>	Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
6	<i>Smart Society</i>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Sumber: Analisis Strategis *Smart City* Kota Balikpapan, 2020

Tabel 5.4 Analisis SWOT Berdasarkan Pilar *Smart City*

<i>Pilar Smart City</i>	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
<i>Smart Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. infrastruktur sudah tersedia 2. ada dukungan pemerintah 3. Aplikasi sudah banyak. 4. Kebijakan sudah ada 5. Blueprint <i>e-governance</i> sudah ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak aplikasi dari pusat yang rumit dan sulit diintegrasikan. 2. Aplikasi dilingkungan pemerintah kota belum terintegrasi 3. Pembangunan infrastruktur masih masih parsial. 4. Data Center belum terpusat 5. SDM Terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi di internal pemerintah kota. 2. Integrasi lintas instansi lain. 3. Menjaring stakeholder dalam hal pembangunan sistem untuk peningkatan pelayanan. 4. Percepatan pembangunan dengan IT. 5. Budaya kerja meningkat 6. IPM Meningkat 7. Masyarakat lebih melek IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi. 2. Potensi PAD meningkat, namun pendapatan APBD menurun. 3. Menegakkan disiplin pegawai. 4. sinergitas antar instansi pemerintah kota. 5. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan IT.
<i>Smart Economy</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Infrastruktur Bandara dan pelabuhan Penumpang dan Peti kemas bertaraf Internasional, 2. Lokasi kota Balikpapan berada di tempat yang strategis sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan berada di jalur Alki II, 3. Memiliki Sarana Perdagangan Modern dan Hotel Berbintang 4. Pusat Perkantoran Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya distribusi barang dan living cost mahal 2. Biaya UMK relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain 3. Pasokan Barang 90% berasal dari luar Balikpapan atau Kalimantan Timur 4. Market yang terbatas karena jumlah penduduk Balikpapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 3 Proyek Startegis Nasional di Balikpapan 2. Ada isu Kalimantan timur menjadi Ibu Kota Negara 3. Ditetapkan kota Balikpapan sebagai kota MICE 4. Dikeliling daerah hinterland yang kaya sumber daya alam. 5. Pengembangan Fintech dengan memanfaatkan Komunitas Ekonomi Kreatif 6. Pengembangan Data Center di kawasan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian Kaltim yang masih berbasis sumber daya alam yang berisiko terhadap fluktuasi harga komoditas. 2. Volatilitas harga komoditas barang menyebabkan inflasi barang cukup tinggi 3. Berfungsinya bandara di Kota Samarinda sebagai Bandara yang melayani penerbangan skala Nasional 4. Banyaknya permasalahan dalam legalitas

	<p>Asing, BUMN regioanal dan instansi vertikal</p> <p>5. Memiliki Universitas Negeri berbasis Teknologi untuk wilayah Timur</p> <p>6. Pusat aktivitas jasa keuangan/perbankan di Kalimantan Timur</p> <p>7. Keamanan lebih terjamin dengan adanya Polda Kaltim dan Kodam Mulawarman yang berlokasi di Balikpapan.</p> <p>8. Lokasi relatif terhindar dari bencana (gempa dan gung berapi)</p> <p>9. Jumlah generasi produktif cukup tinggi dan komposisi penduduk yang heterogen</p> <p>10. Memiliki Tim Gerakan Nasional Non Tunai</p>	<p>dan Kaltim yang tidak besar</p> <p>5. Daya saing UMKM yang masih rendah</p> <p>6. Sedikit usaha berbasis Fintect</p> <p>7. Kurang jasa Konsultan di Balikpapan</p> <p>8. Ruang untuk pengembangan kawasan terbatas.</p> <p>9. Harga tanah yang kurang kompetitif</p>	<p>7. Elektronifikasi pusat bisnis</p> <p>8. Meningkatkan Kualitas SDM UMKM</p> <p>9. Perluasan Jaringan Distribusi</p> <p>10. Perluasan pangsa Pasar</p>	<p>tanah dan</p>
<i>Smart Environment</i>	<p>1. Sanitary Landfill</p> <p>2. Non tambang</p> <p>3. Perwal No. 8/2018 tentang pengurangan penggunaan</p>	<p>1. Pengangkutan sampah belum maksimal</p> <p>2. Biaya operasional tinggi</p>	<p>1. Bank Sampah</p> <p>2. Gas metan hasil pengolahan sampah</p> <p>3. Pengolahan IPAL komunal menjadi pupuk</p> <p>4. TPA -> study wisata</p>	<p>1. Pemicu banjir</p> <p>2. Penyebaran penyakit</p> <p>3. Pencemaran air bawah tanah</p> <p>4. Longsor</p>

	kantong plastic <i>RS, Sekolah, Hotel, Kantor beberapa sudah ada bank sampah</i>	3.Sampah belum terpilih	<i>Recycle -> kerajinan tangan</i>	
<i>Smart Living</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan kota yang bersih, kondusif, masyarakatnya heterogen, dan bebas tambang batu bara. 2. Letaknya strategis (sebagai pintu gerbang Kaltim-Kaltara, dilintasi jalur ALKI II, relatif bebas dari gempa) 3. Ketersediaan pelabuhan (darat, udara, dan laut) bertaraf internasional. 4. Ketersediaan fasilitas pelayanan perindustrian, perindustrian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata yang lengkap. 5. Pemimpin daerah dan seluruh stakeholder berkemauan kuat untuk melaksanakan perubahan. 6. Memiliki regulasi terkait <i>e-government</i> (SK dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki data & <i>command center</i> 2. Belum memiliki <i>Masterplan Smart City</i> 3. Sebagian wilayah rentan banjir dan longsor serta rawan kebakaran. 4. Rendahnya ODF 5. Biaya hidup tinggi 6. Keterbatasan kapasitas air baku 7. Kapasitas SDM sedang 8. Kapasitas jalan kecil 9. Kebutuhan bahan pokok, pangan dan hewani sebagian besar dipasok dari luar Balikpapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di tingkat nasional : sebagai kota adipura, kota nyaman dihuni, kota wahana tata nugraha, kota kreatif, kota kemudahan mulai berbisnis, kota MICE dan PKN. 2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. 3. Peningkatan PAD tidak berbasis sumber daya alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degradasi lingkungan 2. Peningkatan peredaran narkotika 3. <i>Penurunan budaya akibat pengaruh internet</i>

	<p>Perwali) dan aplikasi dalam mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p>7. Memiliki struktur, infrastruktur, dan supra struktur yang cukup.</p> <p>8. Menikmati bonus demografi (tahun 2015 : 71 % usia produktif dan 25% usia muda</p> <p>9. Memiliki kelembagaan Balikpapan Creative Forum.</p>			
<i>Smart Branding</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota MICE 2. Fasilitas Transportasi / Pintu Gerbang 3. Kelengkapan Sarana Perhotelan (Amenitas) 4. <i>Political Will</i> dalam Pengelolaan Kota Berkelanjuta 5. <i>Kualitas Sumber Daya Manusia</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada <i>story telling</i> yang kuat tentang sejarah kota. 2. Konsep Branding berubah-ubah (dinamis) 3. Belum adanya kesepakatan value / konten yang ingin ditonjolkan 4. Ekosistem kota kreatif belum terbentuk secara sistematis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya event tahunan yang konsisten terjadwal 2. Perkembangan Era Digital. 3. Banyaknya pendatang dengan kualitas SDM yang baik. 4. Faktor keamanan dan minim konflik 5. <i>Potensi pesisir yang belum digarap dengan baik</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian bergantung pada daerah sekitar (ekonomi berkelanjutan) 2. Bencana banjir dan kekurangan sumber air baku 3. Biaya Hidup yang tinggi
<i>Smart Society</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah sadar akan pentingnya pendidikan di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah belum mencukupi untuk sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pertumbuhan penduduk yang stabil. 2. Tingkat kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat membaca buku yang kurang

	kota Balikpapan. 2. Sosial masyarakat yang kondusif	zonasi SMP dan SMA. 2. SDM yang belum tercukupi dari sisi kualitas dan kuantitas (Guru). 3. Rendahnya tingkat kemampuan akan akses teknologi (GAPTEK). <i>Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi (9,52%)</i>	informasi yang cepat dan mudah. 3. Pemerataan Infrastruktur dan SDM pada setiap sekolah. 4. Peningkatan Literasi Digital dan edukasi e-learning. 5. Butuh pelatihan dan pengembangan kapasitas (kopetensi tenaga kerja).	2. Pluralisme (Gesekan komunal) 3. Dampak sosial yang disebabkan kemiskinan dan pengangguran dapat meningkatkan kriminalitas yang cukup tinggi.
--	--	--	---	--

Sumber: Analisis Strategis Smart City Kota Balikpapan, 2020

Secara komprehensif, terdapat beberapa sasaran program *Smart City* Balikpapan yang dijabarkan dalam 6 (enam) sub pilar smart city, yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart environment*, *smart branding*, *smart living*, dan *smart society*. Penjabaran mengenai sasaran program smart city tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Sasaran *Smart City* Kota Balikpapan

Pilar Smart City	Sub Pilar Dimensi	Sasaran
<i>Smart Governance</i>	<i>Public Service</i>	Penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintahan
	<i>Bureucracy</i>	Integrasi sistem untuk mendukung efisiensi birokrasi.
	<i>Public Policy</i>	Pendayagunaan informasi melalui implementasi satu data dan open data
<i>Smart Economy</i>	<i>Welfare</i>	Peningkatan akses dan transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal.
	<i>Industry</i>	Peningkatan Produktifitas dan perluasan kesempatan kerja;

	<i>Transaction</i>	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah
<i>Smart Environment</i>	<i>Protection</i>	Penyusunan Regulasi Penataan Wilayah dan Ketahanan Kota terhadap Iklim dan Bencana.
		Pemberian insentif dan disinsentif (Indis) terhadap ketepatan dalam pemanfaatan ruang.
		Pembangunan dan perbaikan wajah Kota Balikpapan
		Pemanfaatan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT) pada pelaporan dan monitoring pencemaran air dan udara.
	<i>Energy</i>	Penggunaan bersama menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS)
<i>Waste</i>	Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)	
		Peningkatan pengelolaan drainase untuk antisipasi dan pengendalian banjir.
<i>Smart Living</i>	<i>Health</i>	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar
	<i>Harmony</i>	Peningkatan Layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat.
		Pengembangan mitigasi bencana untuk antisipasi dampak bencana.
		Peningkatan upaya-upaya pelestarian budaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya
<i>Mobility</i>	Pengembangan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien	
<i>Smart Branding</i>	<i>Business Branding</i>	Pemanfaatan sosial media untuk penyebarluasan city branding Kota Balikpapan.
		Memperkuat pemasaran Kota Balikpapan melalui media
		promosi berbasis digital secara Nasional dan Global.
	<i>City Appearance Branding</i>	Mewujudkan kualitas ruang Kota Balikpapan yang berciri khas lokal.
	<i>Tourism Branding</i>	Pengembangan ekosistem pariwisata Kota Balikpapan yang ramah dan nyaman bagi pengunjung
	<i>Learning</i>	Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan.
		Peningkatan kapasitas agen <i>literacy digital</i>

<i>Smart Society</i>	<i>Community</i>	cerdas dan positif.
		Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi kreativitas masyarakat.
	<i>Security</i>	Peningkatan sarana dan fasilitas untuk kemudahan mengakses layanan publik
		Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Analisis Strategis Smart City Kota Balikpapan, 2020

5.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.3.1 Kebijakan dan Strategi *Smart City* Kota Balikpapan

Pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan merupakan sebuah wujud komitmen dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang dilakukan melalui akselerasi dan sinergi pembangunan daerah dan sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021. Pembangunan berbasis *smart city* ini tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan mengedepankan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), namun juga untuk menumbuhkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Murni sebagai Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau melihat fokus kebanyakan pihak, *Smart City* ini kan seringkali dikaitkan dengan digitalisasi, namun sebenarnya yang paling penting adalah pada perubahan perilaku SDMnya dan ini jauh lebih penting pembangunan. Harusnya dari 6 pilar itu target utamanya ke people dlu. Karena walaupun teknologi berkembang jika tidak diikuti oleh manusianya, maka hasilnya akan percuma. Teknologi berkembang manusia tidak maka itu justru menjadi

ancaman bagi manusia” (Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2021).

Program *smart city* Kota Balikpapan mulai diselenggarakan pada tahun 2019 yang diawali dengan pelaksanaan Bimtek *smart city*. Namun demikian, payung hukum yang kuat mengenai pembangunan dan pengembangan program *smart city* belum diterbitkan karena dokumen *masterplan smart city* mengalami berbagai perubahan. Pada dasarnya, *masterplan smart city* Kota Balikpapan telah selesai dibuat pada akhir tahun 2019, namun pada tahun 2020 terdapat beberapa evaluasi yang akhirnya membuat dokumen masterplan tersebut mengalami perubahan. Revisi dokumen *masterplan smart city* tersebut baru selesai pada tahun 2021 dan masih dalam proses pengajuan (Hasil wawancara dengan Ibu Raihanah, Kabid e-Gov Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, tanggal 2 Agustus 2021).

Pembangunan *smart city* Kota Balikpapan menekankan pada pembangunan dan perubahan 6(enam) pilar *smart city* yang ditetapkan pada tahun 2019, yaitu tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), lingkungan (*smart environment*), pemukiman (*smart living*), dan masyarakat (*smart society*). Namun demikian berdasarkan evaluasi yang dilakukan dalam dokumen masterplan tersebut, maka disepakati untuk mengganti 2(dua) pilar yaitu *smart branding* dan *smart living* menjadi *smart mobility* dan *smart people* (Hasil wawancara dengan Ibu Juni

Yastutik, Kepala Seksi e-Gov Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, Tanggal 4 Agustus 2021).

Smart people ini bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia melalui optimalisasi potensi kualitas pendidikan wara masyarakat dan juga keberadaan komunitas-komunitas yang kreatif serta inovatif untuk mendukung tercapainya *smart city*. Sementara itu smart mobility menekankan pada optimalisasi kondisi infrastruktur jalan kota yang cukup baik dan lokasi strategis Kota Balikpapan yang ditargetkan untuk menjadi kota yang unggul dibidang industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, dan budaya (Hasil wawancara dengan Ibu Raihanah, Kabid e-Gov Kominfo Kota Balikpapan, Tanggal 2 Agustus 2021)

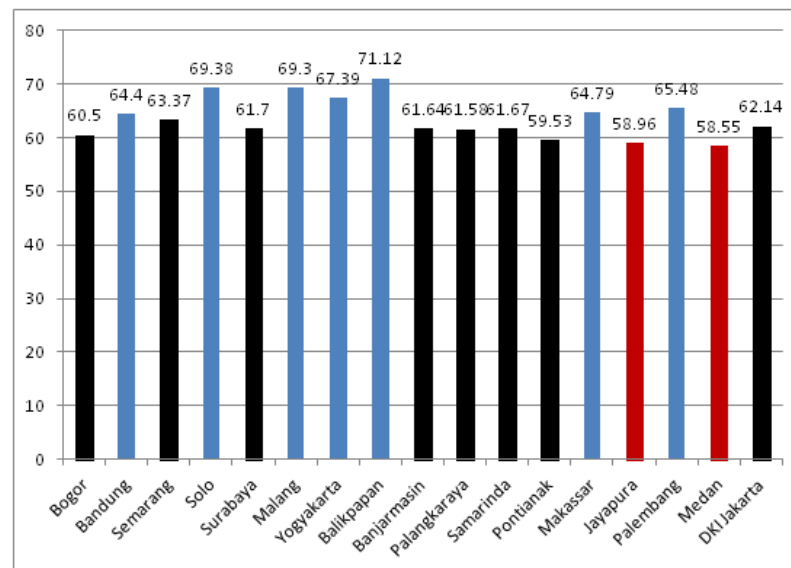
Fokus *smart city* Kota Balikpapan adalah untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan layak huni (*The Most Liveble City*) (Hasil wawancara dengan Bapak Heryanto, Kasi TIK Kominfo Kota Balikpapan, Tanggal 4 Agustus 2021). Konsep kota layak huni menggambarkan sebuah kota dengan atmosfir dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali dan bekerja dari berbagai aspek fisik maupun non fisik seperti ketersediaan kebutuhan dasar, fasilitas publik, ruang terbuka untuk interaksi sosial, keamanan, dukungan fungsi ekonomi dan sosial serta sanitasi.

Pada tahun 2015, Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) dengan kategori kota berpenduduk

200 ribu jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Penilaian Kota Cerdas Versi Kompas ini berdasarkan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang berarti bahwa Kota tersebut dapat memecahkan persoalan warganya dalam tiga aspek tersebut (Ilham et al, 2019)

Selain itu, Kongres Dunia ke-24 *Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlement* (EAROPH) tanggal 10 – 13 Agustus 2014 mengemukakan hasil survey *Indonesia Most Liveble City Index* (MLCI) dimana Balikpapan dipersepsi sebagai Kota Paling Layak Huni oleh warganya dengan nilai 71,12 (Rata-rata nasional sebesar 63, 62) hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Gambar 5.2
Livability Index Kota Balikpapan Tahun 2014



Sumber: Draft *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan, 2019

Pada tahun 2017, *livability index* Kota Balikpapan turun menjadi peringkat ke-tiga dengan nilai 65,8. Berdasarkan hasil survey tersebut, terdapat 6 kota yang masuk dalam kategori *top tier city*, yaitu Palembang

(66,6%), Balikpapan (65,8%), Denpasar (65,5%), Semarang (65,4%), Tangerang Selatan (65,4%), dan Banjarmasin (65,1%).

Pelaksanaan *smart city* Kota Balikpapan dijabarkan dalam rencana strategis berdasarkan pilar-pilar *smart city*.

a. Smart Governance

Fokus yang dilakukan pada pilar *smart governance* adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tumbuhkan partisipasi aktif baik dari pemerintah kota maupun masyarakat untuk mengoptimalkan sistem pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung terciptanya pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah membuat total 105 aplikasi penunjang di lingkungan pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik diberbagai sektor, serta untuk mendukung administrasi dan aktivitas manajemen lainnya (Hasil wawancara dengan Bapak Didik Budiyanto, Kasi Data dan Aplikasi Diskominfo Kota Balikpapan, Tanggal 6 September 2021).

Selain itu, untuk menunjang tercapainya *smart governance*, pemerintah kota Balikpapan membangun infrastruktur TIK melalui peningkatan jaringan internet secara terpusat dengan kapasitas 100MB. Jaringan internet sudah tersebar di Kota Balikpapan, namun masih dalam kapasitas jaringan dibawah 100MB (Wawancara dengan Bapak Heryanto, Kasi TIK, Diskominfo Kota Balikpapan, 4 Agustus 2021). Hal ini yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.6
Tabel Insfrastruktur TIK Kota Balikpapan

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/Tidak	Keterangan (Jumlah, Sebaran, Kapasitas, Status)
1	Ketersediaan jaringan 4G/3G	Ya	Menjangkau hampir seluruh wilayah Kota Balikpapan
2	Ketersediaan broadband acces	Ya	Menjangkau hampir seluruh wilayah Kota Balikpapan
3	Akses internet terpusat	Ya	36 Perangkat daerah, 34 kelurahan, 2 RS 30 Mbps Global dan 50 Mbps Domestik
4	Jaringan antar SKPD (Instansi Pemerintah)	Ada	FO Diskominfo 1 GBPS sepanjang 25 km
5	Ketersediaan Hotspot untuk internal pemerintah dan untuk publik	Ada	129 titik di seluruh PD 4 titik untuk publik (Taman 3 Generasi, Ruang Tunggu DPMPT, Disdukcapil, dan Gedung Klandasan)
5	Data Center Pemerintah	Ada	23 server yang ada di diskominfo
6	Data Center Recovery Pemerintah		
7	Jaringan CCTV Dishub	Ada	FO sepanjang ±60km

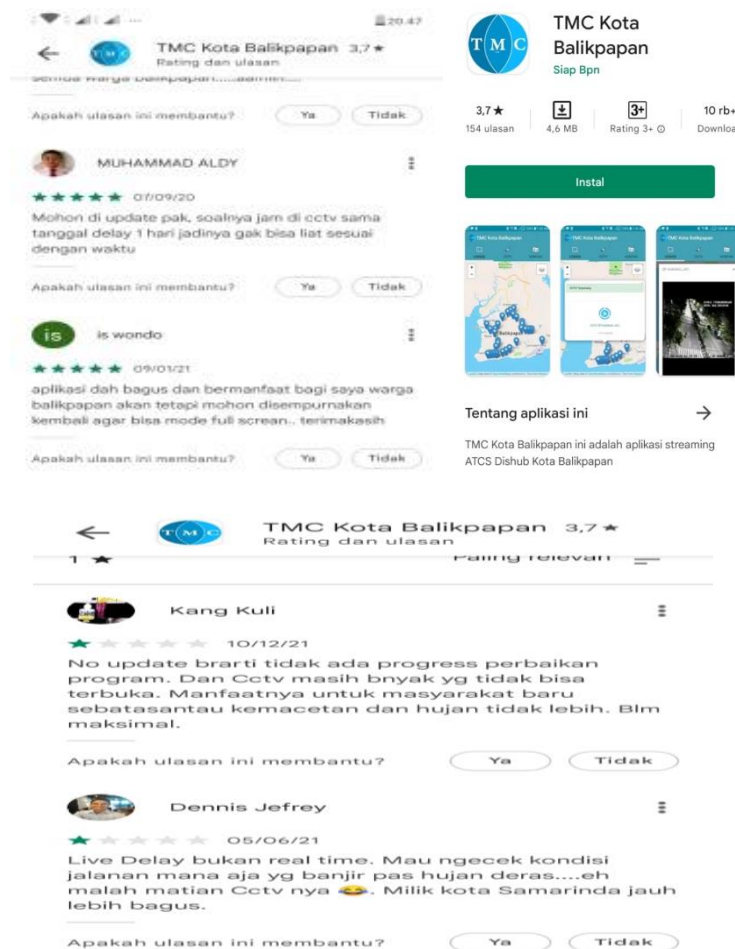
Sumber: Hasil olah data penelitian, 2021

Pada tataran implementasi *smart governance*, Pemerintah Kota Balikpapan membuat berbagai aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti TMC Kota Balikpapan, E-Office Pemkot Balikpapan, LAPOR PAK! Balikpapan. Berbagai aplikasi tersebut dapat diunduh di *Google Playstore*.

Aplikasi TMC (*Traffic Management Center*) Kota Balikpapan merupakan aplikasi streaming ATCS Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui keadaan lalu lintas Kota Balikpapan. Aplikasi ini pada dasarnya sudah diluncurkan pada 9 Februari 2018, dan terdapat 10rb *downloader* yang mengakses aplikasi ini. Kelemahan aplikasi ini adalah, tidak update, dimana

update terakhir dilakukan pada 29 maret 2020 yang menyebabkan banyaknya keluhan dari pengguna aplikasi tersebut.

Gambar 5.3
Aplikasi TMC Kota Balikpapan



Sumber: Google Playstore, TMC Balikpapan, 2021

Selain aplikasi TMN Kota Balikpapan, terdapat aplikasi E-Office Pemkot Balikpapan. Aplikasi tersebut merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi seperti surat menyurat,

nota dinas dilingkungan instansi pemerintah. Aplikasi ini dirilis pada 15 Agustus 2018 dan terdapat 1000 *downloader*. Namun demikian, aplikasi ini juga terakhir dilakukan proses update pada tanggal 26 Juli 2020, sehingga banyak sekali pengguna yang mengemukakan keluhan terkait aplikasi E-Office Pemkot Balikpapan.

b. Smart Branding

Tujuan smart branding adalah untuk meningkatkan brand value daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta kehidupan sosial dan budaya yang mendukung kearifan lokal Kota Balikpapan. Ruang lingkup pengembangan smart branding Kota Balikpapan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.7
Ruang Lingkup Pengembangan *Smart Branding* Kota Balikpapan

Sub Pilar Dimensi	Strategi
<i>Bussiness Branding</i>	Pemanfaatan media sosial untuk penyebarluasan city branding kota Balikpapan
	Memperkuat pemasaran kota Balikpapan melalui media promosi berbasis digital secara nasional maupun global
<i>City Appearance Branding</i>	Mewujudkan kualitas ruang kota Balikpapan yang berciri khas lokal
<i>Tourism Branding</i>	Pengembangan ekosistem pariwisata Kota Balikpapan yang ramah dan nyaman bagi pengunjung, seperti jalan kota, transportasi, restoran.

Sumber: Draft Masterplan Smart City Kota Balikpapan, 2019

Pada tataran implementasi kegiatan yang dilakukan untuk menunjang *smart branding* Kota Balikpapan dimulai dengan peluncuran logo terbaru berdasarkan Perwal No 11 Tahun 2020 tentang Logo *City Branding* Kota Balikpapan. Dalam Peraturan Walikota tersebut ditetapkan bahwa identitas visual untuk mendukung *city branding* Balikpapan terdiri dari *logotype* dengan tulisan “Balikpapan”, serta *tagline* dengan tulisan “Nyaman”. Logo *city branding* ini digunakan sebagai penegas citra Kota Balikpapan untuk menarik kunjungan wisatawan.

Gambar 5.4
Logo *City Branding* Kota Balikpapan



Sumber: <http://web.balikpapan.go.id/infopenting/read/285>

Logo *branding* Kota Balikpapan ini ditempatkan di seluruh lokasi strategis seperti, lokasi wisata, sarana dan prasarana wisata, bus pariwisata dan dibuat untuk *souvenir* (Wawancara dengan Ibu Juni Yastutik, Kasi e-Gov Diskominfo Balikpapan).

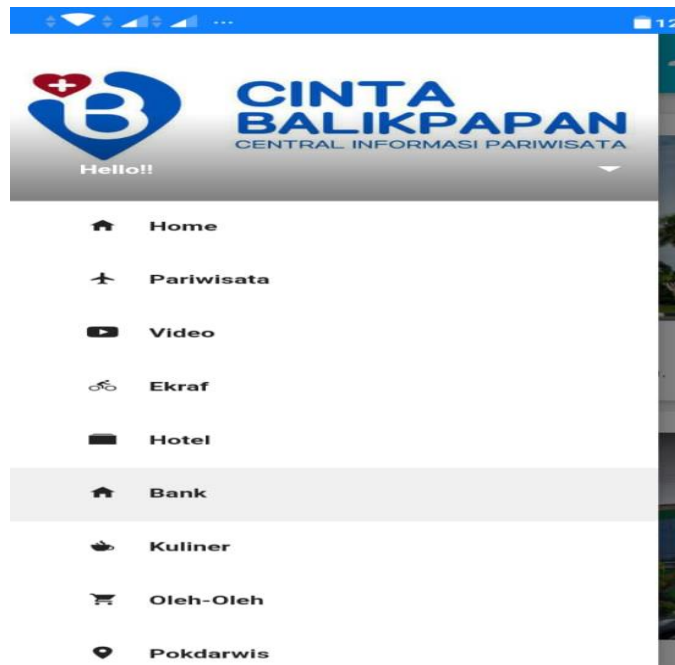
Untuk menunjang tata kota yang indah, pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan pembenahan infrastruktur jalan kota yaitu dengan menata trotoar di

5 ruas jalan utama kota Balikpapan. Selain itu, dalam perwujudan implementasi tourism branding, Pemerintah kota Balikpapan melakukan pembenahan infrastruktur transportasi untuk memudahkan akses warga masyarakat dalam menggunakan transportasi umum di Kota Balikpapan.

Untuk menunjang pariwisata di Kota Balikpapan ini, pemerintah kota bekerjasama dengan *Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies* (ASITA) dan Bank Kaltimara dalam penyediaan bus pariwisata Balikpapan *City Tour* yang digunakan untuk membawa wisatawan di berbagai kawasan pariwisata kota Balikpapan. (Wawancara dengan Bapak Didik Budiyanto, Kasi Data dan Aplikasi, Diskominfo Balikpapan, 6 September 2021). *City Tour* dengan menggunakan bus pariwisata tersebut sudah mulai dijalankan, walaupun pada awalnya sempat mengalami hambatan karena adanya berbagai kebijakan pembatasan pada masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata membuat aplikasi Mobile Cinta Balikpapan yang dapat diunduh di Playstore.

Gambar 5.5
Aplikasi Mobile Cinta Balikpapan



Sumber: Google Playstore

Aplikasi ini merupakan sentral informasi mengenai kepariwisataan di Kota Balikpapan. Wisatawan dapat mengakses aplikasi tersebut untuk mengetahui berbagai informasi mengenai pariwisata, hotel, bank, kuliner, oleh-oleh khas Balikpapan, pokdarwis dan berbagai hiburan lainnya. Namun demikian, sangat disayangkan aplikasi ini out of date sejak awal dirilis (11 maret 2020) dan hanya diikuti oleh 50 *downloader*.

c. *Smart Economy*

Pembangunan *smart economy* harus mempertimbangan isu-isu strategis kota Balikpapan seperti peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis lingkungan (*green economy*). Kota Balikpapan memiliki berbagai potensi daerah sebagai pusat

pemerintahan kota, pusat perdagangan regional, pusat industri, pusat transportasi udara internasional, dan pusat pengolahan migas. Dalam hal ini lingkup pengembangan *smart economy* di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Strategi Pengembangan *smart economy* Kota Balikpapan

Sub Pilar Dimensi	Strategi
Welfare	Peningkatan akses dan transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal.
Industry	Peningkatan Produktifitas dan perluasan kesempatan kerja;
Transaction	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

Faktor kunci keberhasilan pembangunan *smart economy* adalah terbentuknya pos pelayanan teknologi di Kota Balikpapan, terbentuknya incubator bisnis / klinik bisnis, serta terbentuknya sistem pemasaran yang terinkubasi.

Dalam tataran implementasi *smart economy*, Pemerintah Kota Balikpapan membuat Mal Pelayanan Publik yang diluncurkan pada 9 Februari 2021 yang berlokasi di DPMPT jalan Ruhui Rahayu 1 Kota Balikpapan. Mal Pelayanan Publik merupakan tempat pelayanan publik baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan bahkan pihak swasta yang ditempatkan dalam satu gedung. Hal ini akan membantu kenyamanan dan kemudahan

seluruh masyarakat dalam mengurus berbagai perijinan di Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sistem perijinan satu pintu terpadu terkait berbagai perijinan, namun dalam tataran pelaksanaan sistem perijinan ini perlu dilakukan secara lebih sederhana untuk proses administrasinya. Seperti halnya ketika tim peneliti harus mengurus surat izin penelitian, prosesnya bukan hanya dilakukan secara online, namun harus dilakukan secara *offline* juga. Kemudian tim peneliti juga harus bergerak dari kantor DPMPT ke kantor Kesbangpol untuk pengurusan tersebut. Hal ini dirasa kurang efektif dan efisien (Hasil Observasi Tim Peneliti, 2021).

Pemerintah Kota Balikpapan juga mengembangkan Sentra Industri Kecil Teritip yang telah dibangun sejak tahun 2018. Terdapat 20 rumah produksi yang dibangun untuk pelaku IKM di Kota Balikpapan yang diperuntukan IKM pengolah hasil pertanian (7 Unit) dan IKM pengolahan hasil hutan (13 Unit). Namun demikian, sentra industri kecil teritip ini kurang diminati, karena pelaku IKM masih enggan menempati tempat tersebut. Dari 20 pelaku IKM yang ada, baru 3 pelaku IKM yang menjalankan produksi di Sentra Industri Kecil Teritip tersebut (Hasil wawancara dengan Ibu Juni Yastutik, Kasi e-Gov Diskominfo Kota Balikpapan, 4 Agustus 2021). Selain membangun sentra industri kecil, Pemerintah Kota juga mulai melakukan pembangunan Rusunawa di

kawasan Sentra Industri Kecil Teritip. Rusunawa ini dibangun untuk mendukung Bergeraknya kawasan Sentra Industri Kecil Teritip.

Selain itu, untuk membentuk inkubator bisnis di Kota Balikpapan, maka Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian melakukan pemutahiran basis data IKM UKM dan koperasi. Membangun inkubator bisnis juga dilakukan dengan pelaksanaan berbagai pelatihan kewirausahaan, packaging, foto produk untuk meningkatkan skill kewirausahaan bagi pelaku UMKM di Kota Balikpapan. Sementara itu, Pemerintah Kota bekerjasama dengan PT. Telkom juga membuat website dan membuat sistem e-commerce dan ini ditargetkan dapat selesai di tahun 2023. (Wawancara dengan Bapak Ali Ichwan, Kabid Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, Bappeda Balikpapan 23 September 2021)

d. *Smart Living*

Smart living berkaitan tentang peningkatan kualitas kehidupan (*quality of life*), budaya (*culture*) yang lebih baik. fokus *smart living* adalah pada bagaimana cara masyarakatnya hidup dan beraktivitas, transportasi yang nyaman, serta sarana dan prasarana yang terintegrasi dan efisien. Faktor penentu keberhasilan dalam smart living adalah terlaksananya pelaksanaan kesehatan yang sesuai standar, terlaksananya pelayanan *pre-hospital* dengan

response time dibawah 10 menit, serta terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman dan efisien.

Implementasi *smart living* dilaksanakan dalam berbagai program kegiatan seperti penyediaan internet gratis dan aman melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta (PT. Telkom serta Telkomsel). Selain itu pemerintah daerah juga berupaya menyediakan layanan transportasi publik berbasis jalan, serta bus umum yang menghubungkan antar kota disekitar Balikpapan. Pada tahap selanjutnya, pemerintah Kota Balikpapan akan berupaya menyediakan layanan transportasi publik khusus untuk difabel, serta pembangunan smart PJU (Penerangan Jalan Umum). (Hasil wawancara dengan Ibu Juni Yastutik, Kasi E-Gov Diskominfo Kota Balikpapan, 4 Agustus 2021). Dalam Musrembang RPJMD Kota Balikpapan, dikemukakan permasalahan yang masih dihadapi Kota Balikpapan yang saat ini menjadi skala prioritas utama untuk mendukung tercapainya smart living, diantaranya adalah (PPT Musrembang RPJMD Balikpapan 2021-2026):

1. Belum optimalnya pengembangan koridor sarana angkutan umum.
2. Belum optimalnya pengembangan SAUM, manajemen rekayasa lalulintas, serta pengembangan jaringan jalan kota.

3. Kurangnya sarana dan prasarana parkir dan belum adanya peraturan mengenai parker.

Selain permasalahan transportasi, untuk mendukung smart living Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk membangun sistem layanan kesehatan yang berbasis *online* dan terintegrasi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya literasi masyarakat mengenai informasi dan pengetahuan mengenai kesehatan yang disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk mengakses pelayanan publik secara daring.

e. *Smart Society*

Smart society merupakan konsep *smart city* yang mensyaratkan adanya kolaborasi dan partisipasi antara pemerintah, masyarakat dan seluruh *stakeholders* lainnya. Faktor penentu keberhasilan smart society adalah terciptanya ketertibanm kerukunan serta masyarakat yang sadar lingkungan, data pendidikan yang mudah diakses, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kemudahan akses layanan publik dan komunikas kreatif. Strategi membangun *smart society* Kota Balikpapan menitikberatkan pada 3 pilar dimensi sebagai berikut:

Tabel 5.9
Strategi Membangun *Smart Society* Kota Balikpapan

Sub Pilar Dimensi	Strategi
<i>Learning</i>	Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan
	Peningkatan kapasitas agen literacy

	digital
<i>Community</i>	Peningkatan literasi digital untuk menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan positif
	Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi kreativitas masyarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana untuk kemudahan akses pelayanan publik
<i>Security</i>	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Draft *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan, 2019

Pada tataran implementasi *smart society* pada bidang pendidikan di komandani oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan membangun sistem informasi Manajemen Pendidikan yang terintegrasi data Dapodik (Wawancara dengan Bapak Heryanto, Kasi TIK, Diskominfo Kota Balikpapan, 4 Agustus 2021). Namun demikian, hal tersebut masih menjadi persoalan karena masih rendahnya aktivitas sekolah untuk melakukan update pada sistem Dapodik (Musrebang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026).

Pemerintah daerah juga melakukan pemutakhiran data Pemerlu Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat terintegrasi dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Pihak OPD yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Dinas Sosial. Salah satu hambatan dalam permasalahan ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur kelembagaan dan fungsi SLRT (Musrebang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026).

Selain itu, untuk mendukung tercapainya *smart society*, pemerintah daerah mengembangkan aplikasi lapor warna (e-warga) tingkat RT, integrasi layanan SiTanggap dan LAPOR!SP4N (LAPOR PAK! Balikpapan).

Aplikasi SiTanggap merupakan sistem informasi & tanggapan aduan publik. Aplikasi ini dirilis pada 06 Maret 2018 dan digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam penyampaian aspirasi serta aduan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Aplikasi SiTanggap ini diunduh oleh 100 *downloader* namun update terakhir dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, sehingga dapat dikatakan aplikasi ini tidak aktif.

Sementara itu aplikasi LAPOR! SP4N merupakan aplikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik yang digunakan sebagai sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional / sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirilis pada 8 September 2019, dan terakhir update pada 14 Oktober 2021 dengan jumlah 50 ribu pengunduh. Kemudian pada tingkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan membuat aplikasi LAPOR PAK! Balikpapan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan. Fungsi aplikasi ini sebagai layanan pengaduan dan pelaporan perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan.

Aplikasi ini dirilis pada tanggal 13 Oktober 2020, dan belum dilakukan proses update. Pada awal penggunaannya, masyarakat antusias terhadap keberadaan aplikasi ini. Terdapat 100 pengunduh yang memberikan testimoni mengenai harapan masyarakat terkait aplikasi LAPOR!PAK tersebut. Namun demikian karena aplikasi ini tidak update dan cenderung rumit maka antusiasme pengguna menjadi menurun. (Hasil Olah Data Penelitian, 2021).

f. *Smart Environment*

Isu mengenai lingkungan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sampah, banjir, drainasi serta kewilayahan. Arah pengembangan *smart city* difokuskan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa strategi pengembangan *smart environment* di Kota Balikpapan:

Tabel 5.10
Strategi Pengembangan *Smart Environment*

Sub Pilar Dimensi	Strategi
<i>Protection</i>	Penyusunan Regulasi Penataan Wilayah dan Ketahanan Kota terhadap Iklim dan Bencana.
	Pemberian insentif dan disinsentif (Indis) terhadap ketepatan dalam pemanfaatan ruang.
	Pembangunan dan perbaikan wajah Kota Balikpapan
	Pemanfaatan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing (IoT)</i> pada pelaporan dan <i>monitoring</i> pencemaran air dan udara.
<i>Energy</i>	Penggunaan bersama menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS)
<i>Waste</i>	Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah

Sub Pilar Dimensi	Strategi
	<i>(Waste)</i>
	Peningkatan pengelolaan drainase untuk antisipasi dan pengendalian banjir.

Sumber: Draft *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan, 2019

Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan dalam kategori smart environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keberhasilan Balikpapan berdasarkan quickwin dalam pemanfaatan gas metan di TPA Manggar (Gerbangkaltim.com, 2021). Ini merupakan salah satu inovasi dari pembuangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Manggar. Pemanfaatan gas metan ini digunakan sebagai pengganti elpiji dan disalurkan ke warga masyarakat di kota Balikpapan. Gas metan tersebut berasal dari ratusan ribu ton sampah yang telah didaur ulang. Program pengelolaan gas metan ini bekerjasama dengan pihak ketiga yang lebih ahli dalam menangani hal tersebut, dalam hal ini adalah PT. Pertamina Tbk. (Hasil Wawancara dengan Ibu Raihanah, Kabid E-Gov, Diskominfo Kota Balikpapan, 2 Agustus 2021)

TPA Manggar merupakan salah satu Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan kinerja terbaik di Indonesia karena dilengkapi fasilitas pendukung kegiatan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) (Outline *Business Case* Untuk Pengelolaan Sampah Manggar, 2020).

Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dengan PT.Pertamina dan Abadan Balikpapan (Mitra Binaan PT. Pertamina dalam bidang *Social Enterprise* dalam pengelolaan sampah) dalam

pengelolaan bank sampah, seperti mesin pencacah kertas, alat press sampah, dan motor pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah daerah juga bekerjasama dengan komunitas Nyampah.

Gambar 5.6
Kerjasama DLH dengan PT. Pertamina & Abadan
Balikpapan dalam Pengelolaan Sampah



Sumber: balpos.com, 2021

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Balikpapan akan mengembangkan aplikasi sistem tracking mobil angkutan sampah dan aplikasi Bank Sampah. Aplikasi *tracking* sampah tersebut dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, sementara itu untuk kerjasama aplikasi Bank Sampah ini sebelumnya dilakukan bersama Komunitas Nyampah dengan nama aplikasi “Go Sampah” namun pengembangan aplikasi tersebut belum optimal sehingga harus dievaluasi dan dikembangkan ulang menjadi sistem aplikasi yang lebih baik.

5.3.2 Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembangunan Daerah Berbasis *Smart City* di Kota Balikpapan

a. Peran Aktor Kolaborasi

Pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan mulai dilaksanakan sejak Balikpapan dipilih sebagai salah satu daerah yang menerapkan gerakan 100 Kota Cerdas pada tahun 2019. Awal pengembangan *smart city* tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis yang dilakukan dalam empat tahap dengan mengundang berbagai OPD di lingkungan instansi pemerintah, swasta, komunitas, perguruan tinggi, serta media.

Hasil pertemuan dengan berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam Bimbingan Teknis menghasilkan komitmen bersama untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai *sustainable city* melalui program *smart city*. Kesepakatan pertama yang dibuat adalah menetapkan dewan *smart city* serta tim pelaksana *smart city*. Pada tataran praktik, kelembagaan dan organisasi di Pemerintah Kota Balikpapan harus berkolaborasi dengan pihak lain (Pentahelix) yaitu akademisi, pelaku usaha, masyarakat/komunitas, dan media agar implementasi berjalan optimal (Wawancara dengan Ibu Murni, Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan, 23 November 2021).

Masing-masing aktor kolaborasi memiliki peran dalam pengembangan *smart city* Kota Balikpapan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 5.11
Desain Kelembagaan dalam Pengembangan *Smart City*
Di Kota Balikpapan

No.	Organisasi/Kelembagaan	Peran	Rencana Aksi
1	Dewan <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	Mengawal pengembangan dan implementasi <i>Smart City</i> , memastikan bahwa pengembangan dan implementasi <i>smart city</i> berada dalam koridor yang ditetapkan.	Penguatan fungsi dan kewenangan Dewan <i>Smart City</i> dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
2	Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Kota Balikpapan	Melaksanakan pengembangan dan implementasi <i>smart city</i> di Kota Balikpapan.	Penguatan fungsi dan kewenangan Tim Pelaksana <i>Smart City</i> dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
3	Bappedalitbang Kota Balikpapan	Merencanakan, monitoring, dan evaluasi pengembangan dan implementasi <i>Smart City</i>	Penguatan fungsi dan kewenangan Bappeda sebagai tim pelaksana <i>Smart City</i> dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> .
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	Menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dalam kerangka pengembangan dan implementasi <i>Smart City</i> .	Penguatan fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tim pelaksana <i>Smart City</i> dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> .
5	OPD dan kecamatan di Kota Balikpapan	Melaksanakan pengembangan dan implementasi <i>Smart City</i>	Penguatan fungsi dan kewenangan OPD terkait <i>Smart City</i> sebagai tim

No.	Organisasi/ Kelembagaan	Peran	Rencana Aksi
			pelaksana <i>Smart City</i> dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> .
6	Masyarakat/Komunitas Kota Balikpapan	Berpartisipasi untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan implementasi <i>smart city</i> .	Peningkatan peran dan eksistensi komunitas di masyarakat dengan berperan aktif baik dalam decision making maupun sebagai volunteer program-program <i>smart city</i> . Eksistensi komunitas tergambar dalam database komunitas yang dimutakhirkan datanya secara periodik.
7	Perguruan Tinggi di Kota Balikpapan	Berpartisipasi untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan implementasi <i>smart city</i> .	Penguatan fungsi dan peran perguruan tinggi dengan menjadi bagian dari Dewan <i>Smart City</i> dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
8	Institusi Bisnis di Kota Balikpapan	Berpartisipasi untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan implementasi <i>smart city</i> .	Mewujudkan MoU institusi bisnis, baik sebagai penyedia barang/jasa, maupun sebagai pertanggung jawaban sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)
9	Media	Berpartisipasi untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan implementasi <i>smart city</i> .	Mewujudkan MoU dengan media yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal menjaga situasi yang kondusif dan promosi <i>city branding</i> .

Sumber: Draft *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan, 2019

Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-177/2019 tentang Dewan *Smart City* Kota Balikpapan ditetapkan

prosonel yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota pemerintah serta pakar dan praktisi. Hal ini termuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.12
Dewan *Smart City* Kota Balikpapan

Ketua	Walikota Balikpapan
Wakil Ketua	Wakil Walikota Balikpapan
Sekretaris	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
Anggota	Asisten Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Anggota (Pakar dan Praktisi)	Rektor Institut Teknologi Kalimantan
	Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
	Rektor Universitas Mulia Balikpapan
	Ketua STIEPAN Balikpapan
	Ketua STIE Madani Balikpapan
	Rektor Universitas Tri Dharma Balikpapan
	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan
	Direktur Utama PDAM Balikpapan
	Manager Area PT. PLN (PERSERO) Balikpapan
	General Manager PT. Telkom Wilayah Balikpapan
	General Manager Pertamina RU V
	Direktur Pertamina Hulu Mahakam
	Direktur Pertamina Hulu Kalimantan
	Ketua IDI Cabang Balikpapan
	Ketua HIPMI Balikpapan
	Head of Digital Lounge Balikpapan
	Ketua PHRI Balikpapan
	Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Balikpapan
	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kota Balikpapan
	Ketua Umum IWAPI Kota Balikpapan
	<i>Branch Manager</i> Telkomsel Kota Balikpapan
	Pimpinan XL AXIATA Kota Balikpapan

	Pimpinan Indosat Ooredoo Balikpapan
	Ketua Kadin Kota Balikpapan
	Ketua APJI Indonesia Balikpapan
	ICON+ Kota Balikpapan
	Syaiful Bahri, SH (Pakar Persampahan)
Anggota (Pemerintah Kota Balikpapan)	Ketua DPRD Kota Balikpapan
	Kepada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
	Kepala Dina Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
	Inspektur Kota Balikpapan
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan
	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan
	Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan
	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan
	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan
	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Balikpapan
	Kepala Bagian Perkotaan Setda Balikpapan
	Kepala Bagian Hukum Setda Balikpapan
	Kepala Bagian Perekonomian Setda Balikpapan
	Camat se-Kota Balikpapan

Sumber: SK Dewan *Smart City* Kota Balikpapan.2019

Berdasarkan SK Dewan *Smart City* yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi 6 pilar *smart city* dan ini tercantum dalam SK tim pelaksana *smart city*. Tim pelaksana *smart city* memiliki tugas untuk menyusun masterplan, menjamin pelaksanaan program *smart city*, melakukan koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya serta evaluasi dan monitoring. Pihak-pihak yang menjadi tim pelaksana *smart city* dijabarkan berikut ini (SK Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan):

A. Pelaksana

- 1). Ketua : Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan
- 2). Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Balikpapan

- 3). Sekretaris I : Kepala Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan Bappeda Litbang Kota Balikpapan
- 4) Sekretaris II : Kepala Bidang *E-Government* Diskominfo Kota Balikpapan

B. Bidang *Smart Governance*

- 1). Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Balikpapan
- 2). Anggota : a. Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan
- b. Kepala Seksi Bina E-Government Diskominfo Balikpapan
- c. Kepala Seksi Data dan Aplikasi Diskominfo Balikpapan.
- d. Kasubbag Program dan Keuangan BKPSDM Kota Balikpapan
- e. Kasubbag Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan
- f. Andang Sinarso S.E (Auditor)
- g. BPS Balikpapan

C. Bidang *Smart Branding*

- 1) Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
- 2) Anggota :
 - a. Kabid Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Balikpapan
 - b. Kabid Pariwisata DPOP Kota Balikpapan
 - c. Kasubbid Infrastruktur Perkotaan Bappeda Litbang
 - d. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal DPMPT Kota Balikpapan
 - e. ASITA
 - f. PHRI
 - g. Ikatan Arsitek Indonesia

D. Bidang *Smart Economy*

- 1). Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan
- 2) Anggota :
 - a. Kasubbag Produksi Daerah Setda Kota Balikpapan
 - b. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

- c. Kepala Seksi Bina Energi dan Sumber Daya Industri DKUMKMP Kota Balikpapan
- d. Kepala Seksi Analisa Data dan Penyuluhan DP3 Kota Balikpapan
- e. Kasubbag Program BPKD Kota Balikpapan
- f. Kepala Seksi BPPDRD Kota Balikpapan
- g. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Balikpapan
- h. Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Balikpapan
- i. Bank Indonesia
- j. Universitas Balikpapan

E. Bidang *Smart Living*

- 1). Koordinator : Kabid Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappeda Litbang
- 2) Anggota : a. Kabid Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

- b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- c. Kepala Seksi Pemeliharaan, Prasarana, Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
- d. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman Disperkim Kota Balikpapan
- f. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas DP3AKB Kota Balikpapan
- g. Kepala Seksi Infrastruktur TIKDiskominfo Kota Balikpapan
- h. Kasubag Tata Usaha Kesbangpol Kota Balikpapan
- i. Real Estate Indonesia (REI) Kota Balikpapan
- j. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Balikpapan
- k. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Balikpapan

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Balikpapan

F. Bidang *Smart Society*

- 1) Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kota Balikpapan
- 2) Anggota :
 - a. Kasubbag Program Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Balikpapan
 - b. Kasubbag Program dan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Balikpapan
 - c. Kepala Seksi Layanan dan
Kerjasama Dinas Perpustakaan
 - d. Kepala Seksi Penanganan dan
Pemberdayaan Fakir Miskin
Dinas Sosial Kota Balikpapan
 - e. Kasubbag Program dan Keuangan
Disnaker Kota Balikpapan
 - f. Kasubbag Program dan Keuangan
Disdukcapil Kota Balikpapan
 - g. Institut Teknologi Kalimantan
 - h. *Digital Innovation Lounge* (DILo)
Balikpapan

G. Bidang *Smart Environment*

- 1) Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan
Perlindungan SDA Dinas Lingkungan
Hidup
- 2) Anggota : a. Kabid. Pertamanan & Permakaman
Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan
- b. Kasubbag Program DLH Kota
Balikpapan
- c. Kepala Seksi Arsitektur Kota DPPR
Kota Balikpapan
- d. Kasubbag Umum BPBD Kota
Balikpapan
- e. Badan Pengelola Hutan Lindung
Sungai Wain Balikpapan
- f. Politeknik Negeri Balikpapan
- g. Pertamina Hulu Kalimantan

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan merupakan dasar dari pencapaian pemahaman yang komprehensif terkait proyek *smart city*. Dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan antara inisiatif pengembangan *smart city* dan harapan dari pemangku kepentingan terhadap keberhasilan program tersebut. (Seunghwan et al, 2020). Kolaborasi pentahelix antara pemerintah dan berbagai

pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci keberhasilan *smart city* Kota Balikpapan. Adanya interdependensi antar aktor kolaborasi membuat pengelolaan kolaborasi ini diperlukan. Menurut Ibu Murni selaku Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan pembangunan *smart city* harus dimulai dari Sumber Daya Manusia yang ada, lebih jauh lagi Pemerintah harus menjadi agen kunci dalam proses pembangunan tersebut untuk menjadi contoh, teladan dan penggerak bagi masyarakat secara keseluruhan (Wawancara Pada Tanggal 23 November 2021).

b. Proses Kolaborasi Smart City

Dalam Proses kolaborasi *smart city*, masing-masing aktor kolaborasi menanamkan komitmen dan kepercayaan bagi keberhasilan pengembangan *smart city*. Hal ini tercermin dari adanya dukungan kerjasama yang solid dimulai dari tataran perencanaan sampai pada tataran implementasi dan evaluasi.

Face to face dialogue yang terjadi antar aktor kolaborasi dimulai sejak beberapa tahun sebelum Kota Balikpapan ditetapkan sebagai salah satu kota yang terpilih dalam gerakan *smart city*. Balikpapan pada survey tahun 2015 sudah dikategorikan sebagai kota yang memiliki indeks kota cerdas dan juga dipersepsi sebagai kota yang nyaman untuk dihuni oleh warga masyarakatnya. Hal ini berarti bahwa Kota Balikpapan pada dasarnya sudah memiliki

berbagai keunggulan daerah serta dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi sebuah kota cerdas yang berkelanjutan.

Konsensus yang dibuat bersama berdasarkan visi *smart city* Kota Balikpapan yaitu “Kota yang Nyaman dan Layak Huni” menjadikan masing-masing pemangku kepentingan bergerak sesuai perannya untuk dapat mencapai visi tersebut. Dalam kutipan wawancara dengan Bapak Didik Budyanto (Kasi TIK Diskominfo Kota Balikpapan, 4 Agustus 2021) dikemukakan sebagai berikut:

“Masing-masing pihak memainkan peran penting. Pemerintahan sebagai leading sector program smart city. Sementara pihak swasta lebih pada dukungan dilapangan, tenaga *expert* mereka banyak dan kita lebih banyak menyerahkan pada yang *expert*. Dukungan dari perguruan tinggi biasanya adalah dukungan aplikasi. Mereka mengembangkan berbagai aplikasi pendukung. Telkom juga mendukung untuk telekomunikasinya. Perguruan Tinggi juga banyak mengirim mahasiswa magang, dan kemudian mereka membantu kami membuat program”.

Bentuk komitmen antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang tertuang dalam berbagai program kerja untuk mendukung *smart city* Kota Balikpapan. Sebagai contoh adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT. Telkom dalam penyediaan *Digital Innovation Lounge* (Dilo) yang merupakan tempat berkumpulnya anak muda kreatif Balikpapan untuk berinovasi dan berkreasi khususnya pada pengembangan digitalisasi di Kota Balikpapan..

Gambar 5.7
Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota
Balikpapan dan PT. Telkom



Sumber: Prokal.co, 2021

Penandatanganan MoU ini sudah dilakukan sejak 2019 dan terus berproses. Faktor pendorong dalam keberhasilan *smart city* bukan hanya terletak pada kesediaan platform teknologi untuk mendukung program tersebut, lebih jauh lagi dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi komunikasi dan informasi sebagai penggerak *smart city* (Tan & Taeihagh, 2020).

Bentuk kolaborasi lainnya dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam. Kolaborasi pengembangan gas metan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan pada tahun 2021 ini terdapat 200 warga masyarakat yang telah menikmati penggunaan gas metan tersebut. PT. Pertamina Hulu Mahakam berperan secara teknis dan pembiayaan pengembangan gas metan tersebut (Gerbangkaltim.com,2021). Pada September 2021 lalu,

Pemerintah Kota Balikpapan kembali melakukan penandatanganan MoU dengan PT Pertamina Hulu Mahakam tentang Plakat Kampung Energi di TPA Manggar (ibukotakini.com, 2021)

Dalam literature dikemukakan bahwa kolaborasi antar sektor dapat terjadi ketika tujuan dan keuntungan kolaborasi bersifat kongkrit dan memungkinkan adanya “*small wins*” dalam proses kolaborasi tersebut (islamy, 2018). Dalam konteks pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan *small wins* ini merupakan cita-cita jangka pendek untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota layak huni yang berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan. Oleh sebab itu fokus kolaborasi pengembangan *smart city* (berdasarkan Quickwin), *smart environment* menjadi skala prioritas utama bagi program *smart city* di Kota Balikpapan.

Dalam proses kolaboratif, kepemimpinan dan kelembagaan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan *smart city*. Pada tataran pelaksanaannya, Pemerintah Daerah berperan sebagai aktor penggerak program *smart city* yang kemudian didukung oleh berbagai pihak lainnya, seperti dewan pakar dan praktisi serta pihak swasta. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Edmunds & Wollenberg (2001) dalam (Palacios et al, 2020) bahwa dalam jaringan *multi-stakeholders* menyaratkan adanya partisipasi yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat serta perlunya investasi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan *smart city*.

Proses pengambilan keputusan multi sektoral tersebut memerlukan fokus perhatian pada hal-hal berikut ini:

- 1). Pengembangan objektif dan proses negosiasi yang netral
- 2). Konsensus yang disepakati bersama
- 3) Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam semua tahapan prosesnya
- 4) Proses komunikasi yang efektif

Komunikasi multiarah merupakan hal yang sangat esensial bagi keberhasilan *smart city*. Pada program *smart city* Kota Balikpapan, pemerintah daerah menyadari bahwa masih kurangnya publikasi mengenai *smart city*. Hal ini seperti kutipan wawancara dengan Bapak Didik Budyanto selaku Kasi Aplikasi dan Data Diskominfo Balikpapan: “Pemerintah Kota Balikpapan lebih memfokuskan pada *action* nya. Jadi yang penting kita bekerja dan bergerak. Tapi memang sayangnya publikasi dan komunikasi jadi terabaikan. Hal tersebut jadi kekurangan kami” (Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2021).

Pada dasarnya, strategi komunikasi harus mendukung program aksi. Terdapat serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan *smart city*, diantaranya adalah membangun *awareness* kepada khalayak baik internal maupun eksternal; membujuk khalayak melalui komunikasi persuasif untuk membangun dukungan khalayak serta c) mendorong

khalayak untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam program tersebut (Morrison, 2019). Komunikasi *smart city* sangat penting untuk membangun *awareness* dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat pada pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan.

Kolaborasi juga membutuhkan adanya komitmen untuk berbagi sumber daya. Kapasitas finansial pemerintah merupakan salah satu mesin pendorong keberhasilan program *smart city*. Tantangan pengembangan *smart city* di negara berkembang adalah masalah keterbatasan anggaran penunjang *smart city* yang mahal. Oleh sebab itu diperlukan instrument pembiayaan yang konvensional dan inovatif untuk meningkatkan investasi modal dalam mengembangkan *smart city* (Tan & Taeihgh, 2020). Dalam implementasi *smart city* di Kota Balikpapan, pemerintah daerah menggunakan anggaran APBD Kota Balikpapan serta dukungan teknis dan finansial yang dilakukan oleh berbagai perusahaan atau lembaga di Kota Balikpapan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah yang dilakukan melalui akselerasi dan sinergi pembangunan daerah dan sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.
2. Pada tahapan *quickwin*, fokus pengembangan *smart city* Kota Balikpapan diarahkan pada pilar *smart environment* dimana sesuai dengan visi *smart city* yang diusung, yaitu Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan layak huni serta berbasis lingkungan berkelanjutan.
3. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, korporasi, dunia usaha, serta media serta adanya interdependensi antar aktor kolaborasi merupakan prasyarat bagi keberhasilan *smart city* Kota Balikpapan.
4. Adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari berbagai *stakeholders* merupakan keuntungan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya percepatan pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan.
5. Pemerintah daerah memainkan peran sebagai aktor penggerak program *smart city* yang memerlukan dukungan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan *smart city* yang telah dirancang

6. Strategik komunikasi yang ada masih mengandalkan media massa dan media *online* dalam penyebaran pesan komunikasi *smart city*

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah harus segera membuat akun media sosial seperti instagram, facebook, twitter, youtube dan tiktok dengan tujuan penggunaan serta konten media sosial yang dibuat secara berbeda dan disesuaikan dengan target audiensnya
2. Perlunya pengembangan SDM TIK yang mumpuni di lingkungan pemerintahan untuk memudahkan dalam pengelolaan berbagai media sosial dan pembuatan konten kreatif sebagai bahan informasi dan edukasi mengenai *smart city* Kota Balikpapan.
3. Pertahankan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan *smart city* Kota Balikpapan, karena saat ini Kota Balikpapan sudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap program pembangunan daerah tersebut
4. Pemerintah daerah harus merancang strategi komunikasi yang komprehensif sebagai upaya untuk membangun literasi kepada seluruh elemen masyarakat luas. Hal tersebut digunakan untuk membangun partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai kesuksesan program *smart city* di Kota Balikpapan

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin. 2016. "Metode Penelitian Sosial". Yogyakarta. Parama Ilmu
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Putra Grafika.
- Djunaedi, Achmad., Permadi, Dedy., Nugroho, Lukito Edi et al. 2018. Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah. Gadjah Mada University Press.
- Islamy, La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance* Konsep dan Aplikasi. Deepublish. Yogyakarta.
- Kurniadi. 2020. *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Penerbit deepublish. Yogyakarta.
- Morrisan. 2014. Manajemen *Public Relations* Menjadi Humas Profesional. ISBN 9789791486361. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Satori, Djam'an., Komariah, Aan. 2014. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung. Alfabeta

Jurnal

- Ansell, Chris., Gash, Alison. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice. The Journal of Public Administration Research and Theory*. doi:10.1093/jopart/mum032. P. 543-571.
- Broccardo, Laura., Culasso, Francesca., Mauro, Sara Giovanna. 2019. *Smart City Governance: Exploring The Institutional Work of Multiple Actors Towards Collaboration. International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2018-0126>. Emerald Publishing Limited.
- Conoras, Moch El Bahar., Hikmawati, Nina Kurnia. 2018. *Smart City Peluang dan Tantangan Untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera*. Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018. STIMIK Atma Luhur Pangkalpinang 8-9 Maret 2018. P 399-404.
- Dameri, Renata Paola. 2013. *Searching for Smart City Definition: a Comprehensive Proposal. International Journal of Computers & Technology* Vol 11 No. 5. ISSN 2277-3061. P. 2544-2551

- Guimares, Julio Cesar Ferro., Severo, Eliana Andrea., et al. 2019. *Governance and Quality of Life in Smart Cities: Towards Sustainable Development Goals*. Journal of Clear Production. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119926>.
- Ilham, Muhammad., Setiawan, Irfan., Nawawi, M. 2019. Analisis Penguatan Sumberdaya Daerah Dalam Pelaksanaan *Smart Governance* di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol.9 No.1 April 2019. p-ISSN 2614-0241. e-ISSN 2301-6965. p.63-73.
- Myeong, Seunghwan., Kim, Younhee., Ahn, Michael J. 2020. *Smart City Strategies – Technology Push or Culture Pull? A Case Study Exploration of Gimpo and Namyangju, South Korea*. <https://dx.doi.org/10.3390/smartcities4010003>
- Pereira, Gabriela Viale., Cunha, Maria Alexandra., Lampoltshammer, Thomas J., Parycek, Peter., Testa, Mauricio Gregianin. 2017. *Increasing Collaboration and Participation in Smart City Governance: a Cross-Case Analysis of Smart City Initiatives*. *Information Technology for Development*, DOI: 10.1080/02681102.2017.1353946. ISSN: 0268-1102 (Print) 1554-0170 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/titd20>.
- Sanjaya, Andika., Krisna, Adi Swante., Mursito, Tatas Bayu., Supriyadi. 2018. *Research Trends of Smart City In Indonesia: Where do We Go From Here?*. DOI:[10.31227/osf.io/ge359](https://doi.org/10.31227/osf.io/ge359).https://www.researchgate.net/publication/326135648_Research_Trends_of_Smart_City_in_Indonesia_Where_Do_We_Go_from_Here.
- Tan, Si Ying dan Taeihagh, Araz. 2020. *Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review*. Sustainability 2020, 12, 899. Doi:10.3390/su12030899. www.mdpi.com/journal/sustainability.

Sumber Berita Online

- Maulana, Muhammad. 09 Juni 2019. Pemkot Balikpapan Membangun Aplikasi Smart City. <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/muhammad-maulana-3/pemkot-balikpapan-membangun-aplikasi-ismart-city/1>. Diakses pada 15 Mei 2021 Pukul 20.26.
- Perdana, Ahmad Baikuni. 2020. Tantangan Mewujudkan *Smart City* di Indonesia. [https://www.researchgate.net/publication/340265740 Tantangan Mewujudkan Smart City di Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/340265740_Tantangan_Mewujudkan_Smart_City_di_Indonesia). Dipublikasikan pada 30 Maret 2020. Diakses pada tanggal 02 Mei 2021.
- Pemkot Balikpapan dan Telkom Tandatangani MoU Untuk Akselerasi *Smart City*. 2019. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/368177/pemkot-balikpapan-dan-telkom-tandatangani-mou-untuk-akselerasi-smart-city>. Diakses pada 1 Desember 2021.

Program Balikpapan *Smart City* Dimulai. 25 Juli 2019.
<http://diskominfo.balikpapan.go.id/detail/berita/19/program-balikpapan-smart-city-dimulai>. Diakses pada 15 Mei 2021 Pukul 21.00

Kelola Sampah DLH Gandeng Abadan dan Pertamina. 27 Agustus 2021.
<https://www.balpos.com/kelola-sampah-dlh-gandeng-abadan-dan-pertamina>.
Diakses pada 1 Desember 2021.

Dokumen Lainnya

Buku Draft Analisis Strategis *Smart City* Kota Balikpapan

Buku Draft *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan

Buku Draft *Executive Summary Masterplan Smart City* Kota Balikpapan

Kota Balikpapan dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan.
Katalog. 1102001.6471. ISSN: 0215-238X

Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan
2021-2026

Outline Business Case Untuk Pengelolaan Sampah Manggar. KPBU Dalam
Sektor Pengelolaan Sampah

Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia. 2015. Disampaikan oleh Direktur
Perkotaan dan Pedesaan Kementerian PPN/Bappenas dalam Acara
Konferensi e-Indonesia Initiative (eII) dan Smart Indonesia Initiative (SII)
Forum ke-1.

Perwal Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Logo *City Branding* Kota Balikpapan

RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021

SK Dewan *Smart City* Kota Balikpapan

SK Tim Pelaksana *City Branding* Kota Balikpapan



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-177/2019
TENTANG

DEWAN *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Balikpapan sebagai 5 (lima) Dimensi Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam bingkai Madinatul Iman;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 30/Kominfo/HK.03.02/05/2019 dan Nomor: 180/22/MOU-HUK/V/2019 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Balikpapan, perlu membentuk Dewan *Smart City*, sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Smart City Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan *Smart City* Kota Balikpapan dengan susunan personil dan uraian tugas sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dewan *Smart City* Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. memberikan arahan aspek strategis teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
2. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Kota Balikpapan;
3. menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi Perangkat Daerah;
4. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota Balikpapan untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kota Balikpapan;
5. menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kota Balikpapan;
6. melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* paling sedikit satu bulan sekali;
7. membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai materi evaluasi; dan
8. memberikan laporan tertulis mengenai implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Mei 2019



28. Ida Bagus Dharmawan, S.T., M.Si. (Pakar Lingkungan)

- E. Anggota (Pemerintah Kota Balikpapan)
1. Ketua DPRD Kota Balikpapan
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
 9. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
 10. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
 12. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
 13. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
 14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan
 15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
 16. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
 17. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
 18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
 19. Inspektur Kota Balikpapan
 20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan
 21. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan
 22. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
 23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan
 24. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan
 25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
 26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan
 27. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan
 28. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan
 29. Kepala Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan
 30. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan

31. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan

32. Camat Se-Kota Balikpapan



WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-177/2019
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

URAIAN TUGAS DEWAN *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

1. Ketua:
 - a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi pengembangan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - f. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam pengembangan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - h. memimpin rapat Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - i. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Dewan *Smart City* Kota Balikpapan; dan
 - j. menyampaikan laporan, pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan.
2. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - c. merumuskan rencana program kegiatan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

3. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
- c. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- d. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan *Smart City* Kota Balikpapan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

4. Anggota Sekretaris:

- a. membantu Sekretaris mempersiapkan dan menyusun rencana program kerja kesekretariatan;
- b. membantu Sekretaris merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
- d. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kesekretariatan;
- e. mewakili Sekretaris apabila berhalangan hadir; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

5. Anggota (Pakar dan Praktisi):

- a. membantu pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan sesuai Kepakaran dan atau keilmuan yang dimilikinya; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

6. Anggota (Pemerintah Kota Balikpapan):

- a. membantu pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Dewan *Smart City* Kota Balikpapan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.





WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-178/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- a. bahwa visi Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Balikpapan sebagai 5 (lima) Dimensi Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam bingkai Madinatul Iman;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 30/Kominfo/HK.03.02/05/2019 dan Nomor: 180/22/MOU-HUK/V/2019 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Balikpapan, perlu dibentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan rencana induk (*Master Plan*) *Smart City* Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana *Smart City* Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menyusun Masterplan *Smart City* Kota Balikpapan;
 2. menyusun dasar hukum Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Balikpapan Tahun 2019;
 3. menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan *Smart City* di dalam Masterplan (Rencana Induk) *Smart City* Kota Balikpapan dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 4. menjamin pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Kota Balikpapan;
 5. melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Wali Kota Balikpapan dan Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 6. menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan *Smart City* Kota Balikpapan;
 7. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan *Smart City* di Kota Balikpapan;
 8. melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan *Smart City* Kota Balikpapan terkait program dan kegiatan *Smart City*; dan
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Mei 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-178/2019
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA BALIKPAPAN

PELAKSANA

- A. Ketua Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan
- B. Wakil Ketua Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
- C. Sekretaris I Kepala Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan Bappeda Litbang Kota Balikpapan
- Sekretaris II Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kota Balikpapan

BIDANG *SMART E-GOVERNANCE*

- A. Koordinator Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan
- B. Anggota
1. Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan
 2. Kepala Seksi Bina E-Government Diskominfo Kota Balikpapan
 3. Kepala Seksi Data dan Aplikasi Diskominfo Kota Balikpapan
 4. Kasubbag Program dan Keuangan BKPSDM Kota Balikpapan
 5. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan
 6. Kasubag Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan
 7. Andang Sinaro, S.E. (Auditor)
 8. BPS Balikpapan

BIDANG *SMART BRANDING*

- A. Koordinator Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang
- B. Anggota
1. Kabid Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Balikpapan
 2. Kabid Pariwisata DPOP Kota Balikpapan
 3. Kasubbid Infrastruktur Perkotaan Bappeda Litbang
 4. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal DPMPPT Kota Balikpapan
 5. ASITA
 6. PHRI
 7. Ikatan Arsitek Indonesia

BIDANG SMART ECONOMI

- A. Koordinator Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan
- B. Anggota
1. Kasubbag Produksi Daerah Setda Kota Balikpapan
 2. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
 3. Kepala Seksi Bina Energi dan Sumber Daya Industri DKUMKMP Kota Balikpapan
 4. Kepala Seksi Analisa Data dan Penyuluhan DP3 Kota Balikpapan
 5. Kasubbag Program BPKD Kota Balikpapan
 6. Kepala Seksi BPPDRD Kota Balikpapan
 7. Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Balikpapan
 8. Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Balikpapan
 9. Bank Indonesia
 10. Universitas Balikpapan

BIDANG SMART LIVING

- A. Koordinator Kabid Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappeda Litbang
- B. Anggota
1. Kabid Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan, Prasarana, Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
 4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman Disperkim Kota Balikpapan
 5. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas DP3AKB Kota Balikpapan
 6. Kepala Seksi Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Balikpapan
 7. Kasubag Tata Usaha Kesbangpol Kota Balikpapan
 8. Real Estate Indonesia (REI) Kota Balikpapan
 9. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Balikpapan
 10. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Balikpapan
 11. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan

BIDANG *SMART SOCIETY*

- A. Koordinator Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan
- B. Anggota
1. Kasubbag Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
 2. Kasubbag Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
 3. Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
 4. Kepala Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Balikpapan
 5. Kasubbag Program dan Keuangan Disnaker Kota Balikpapan
 6. Kasubbag Program dan Keuangan Disdukcapil Kota Balikpapan
 7. Institut Teknologi Kalimantan
 8. Digital Innovation Lounge (DILo) Balikpapan

BIDANG *SMART ENVIRONMENT*

- A. Koordinator Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumberdaya Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup
- B. Anggota
1. Kabid Pertamanan dan Permakaman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
 2. Kasubbag Program DLH Kota Balikpapan
 3. Kepala Seksi Arsitektur Kota DPPR Kota Balikpapan
 4. Kasubbag Umum BPBD Kota Balikpapan
 5. Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Balikpapan
 6. Politeknik Negeri Balikpapan
 7. Pertamina Hulu Kalimantan



Musrenbang

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2021-2026



KERANGKA PAPARAN



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA BALIKPAPAN



GAMBARAN UMUM KOTA BALIKPAPAN



BANDARA & PELABUHAN BERTARAF INTERNASIONAL

PINTU GERBANG KALTIM, KALTARA DAN
RENCANA IBUKOTA NEGARA BARU

M.I.C.E

meeting, incentive, convention & exhibition

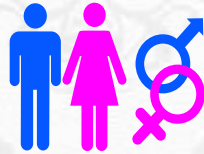
Balikpapan sebagai Kota
Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata,
Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Pengolahan MIGAS di Wilayah Indonesia Timur

Basis Perusahaan Migas di Indonesia



LUAS WILAYAH : 50.330 Ha
TOPOGRAFI : 85% berbukit dan 15% datar



JUMLAH PENDUDUK

704.110 Jiwa (Jun-2021)

Laki - Laki : 359.860 Jiwa

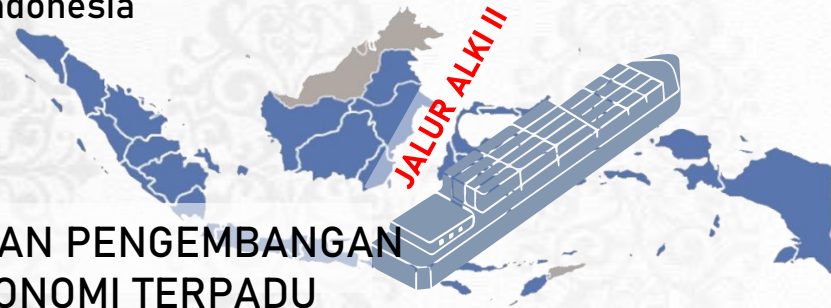
Perempuan : 344.250 Jiwa



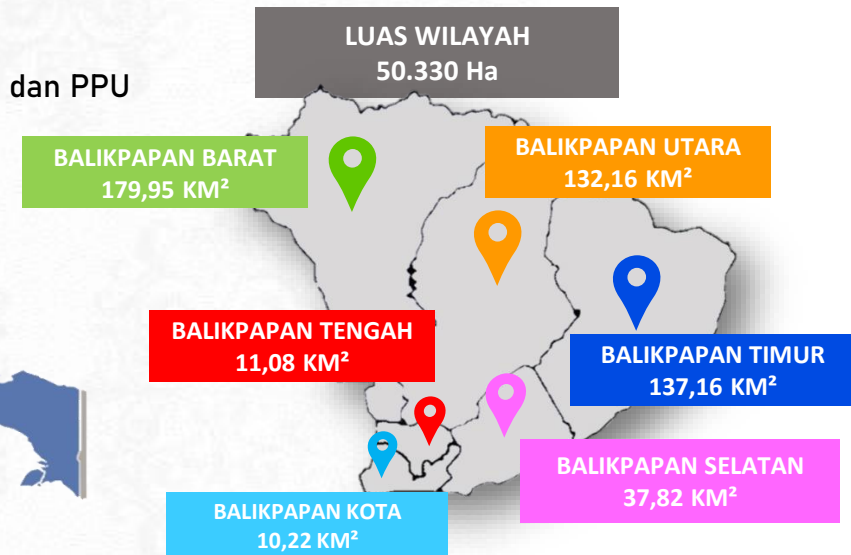
BATAS WILAYAH

Utara : Kab. Kutai Kartanegara dan PPU
Selatan : Selat Makassar
Timur : Selat Makassar
Barat : Teluk Balikpapan

KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU



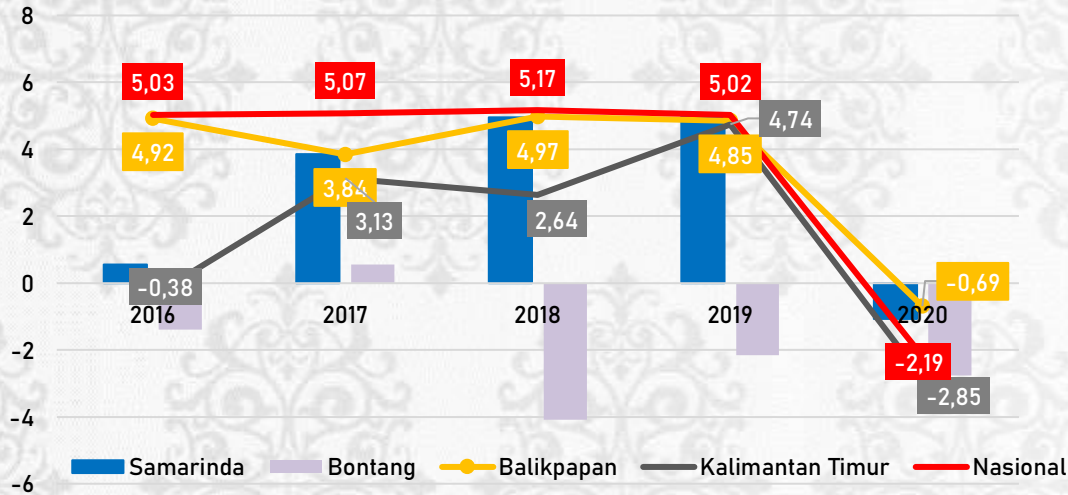
Terdiri atas:
6 Kecamatan
34 Kelurahan



KONDISI PEREKONOMIAN KOTA BALIKPAPAN

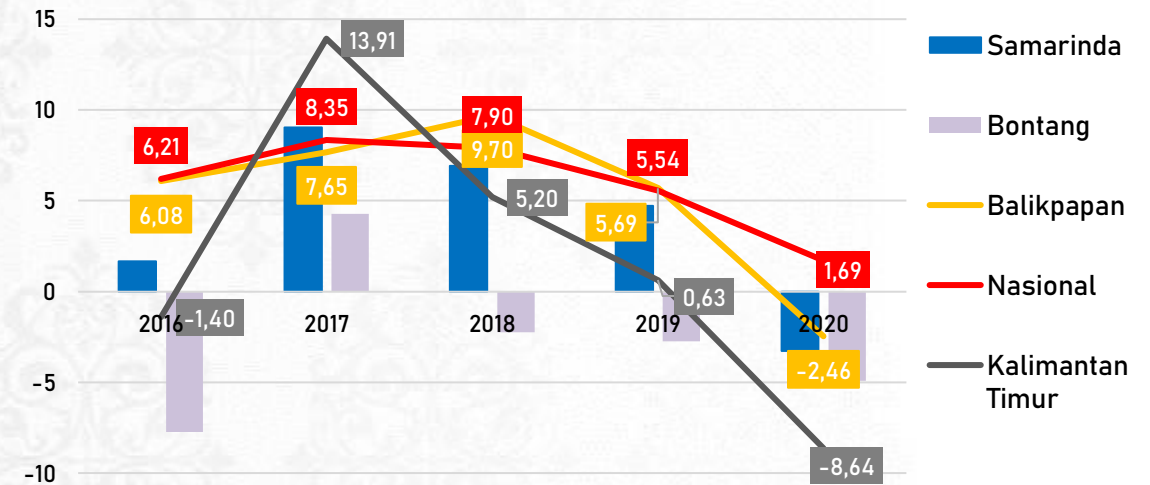


PERTUMBUHAN EKONOMI

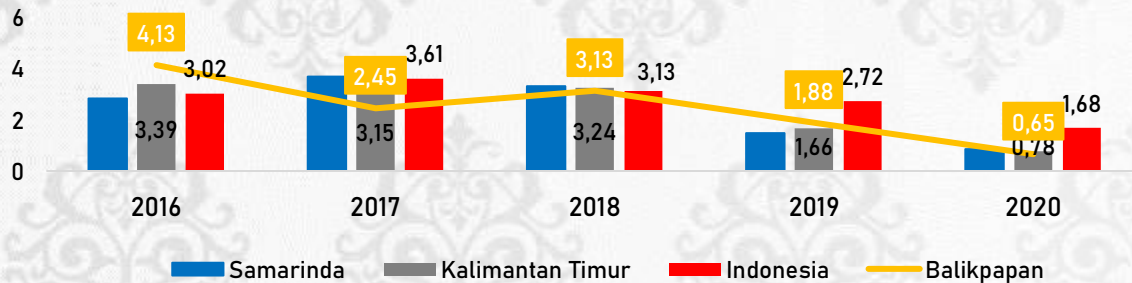


PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA

Tahun 2020 PDRB per kapita ADHB Kota Balikpapan sebesar Rp. 155,98 Juta

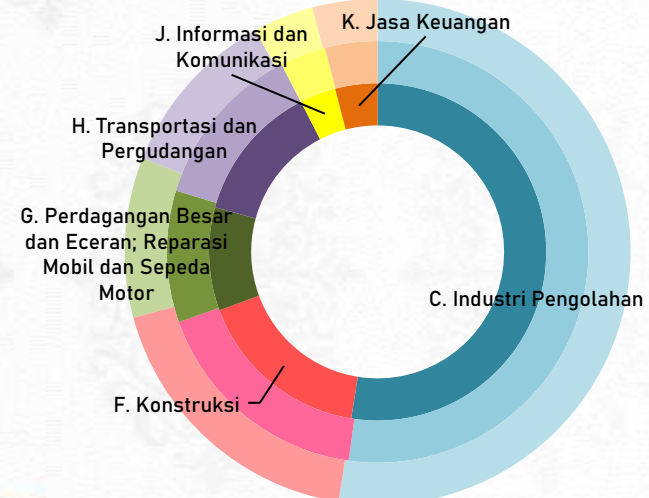


INFLASI



Dari sisi *demand*, pencapaian inflasi yang rendah dan stabil disebabkan oleh berkurangnya konsumsi masyarakat selama pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi *supply* terjaganya pasokan komoditas khususnya bahan makanan turut menunjang kinerja inflasi.

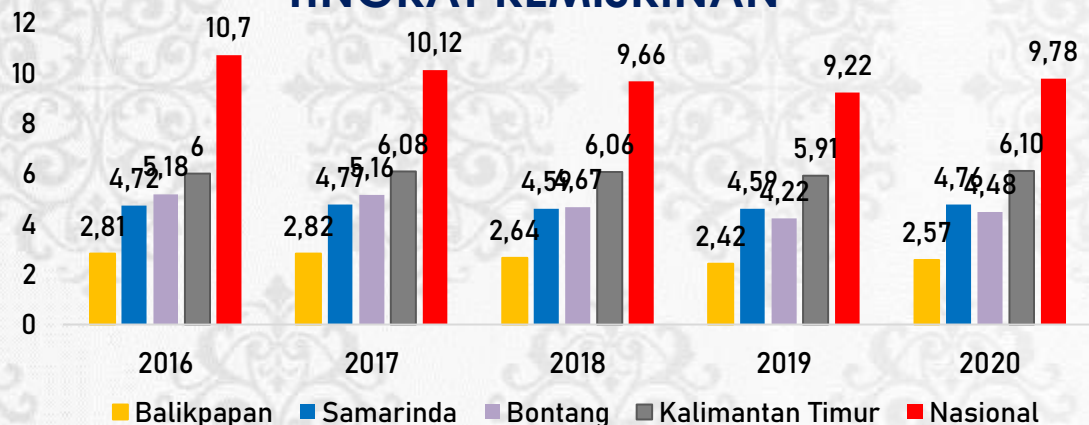
DISTRIBUSI PDRB ADHB 5 SEKTOR DOMINAN MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA BALIKPAPAN



- sektor industri pengolahan tumbuh negatif seiring menurunnya kinerja industri migas sebagai dampak pandemi covid19
- Sektor transportasi dan pergudangan turut berkontraksi yang dipengaruhi oleh terbatasnya mobilitas penduduk

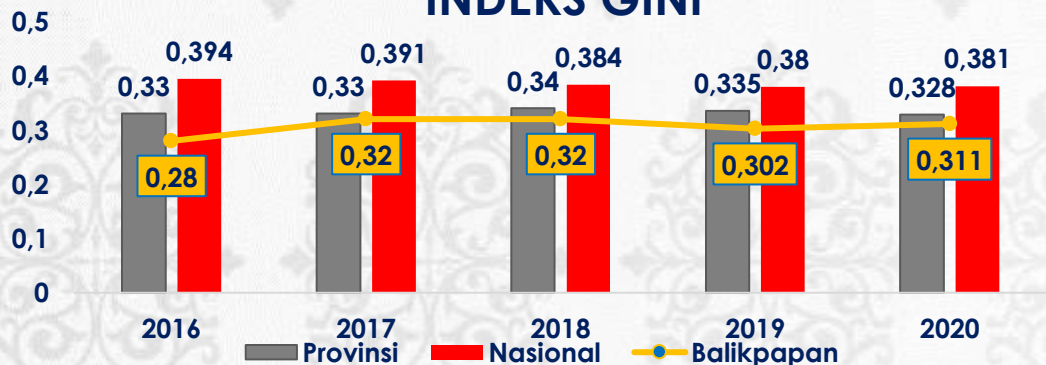
KONDISI KESEJAHTERAAN KOTA BALIKPAPAN

TINGKAT KEMISKINAN



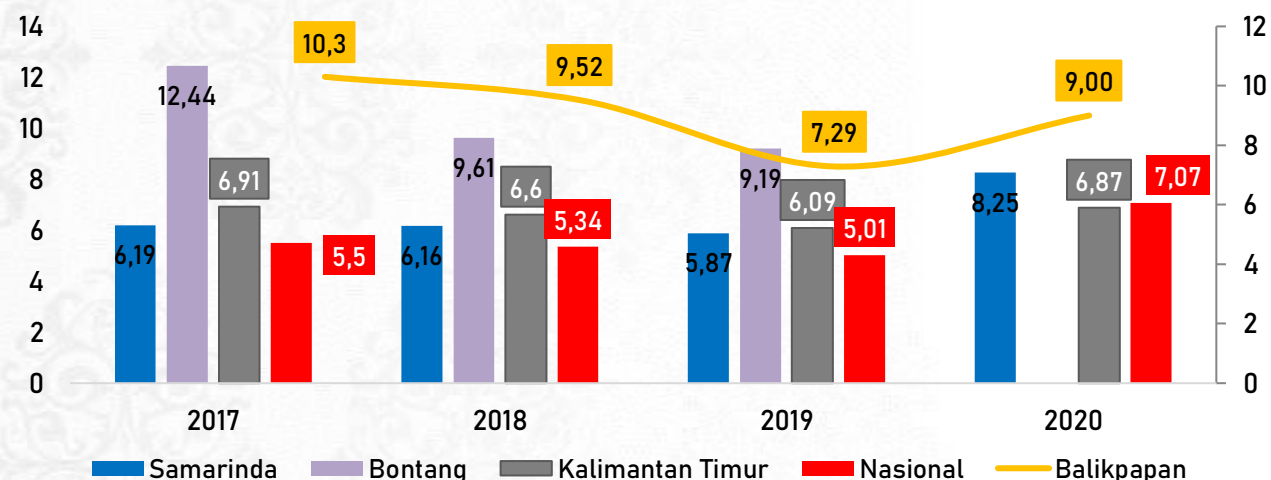
Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi dan nasional serta menjadi kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya terendah di Provinsi Kalimantan Timur.

INDEKS GINI



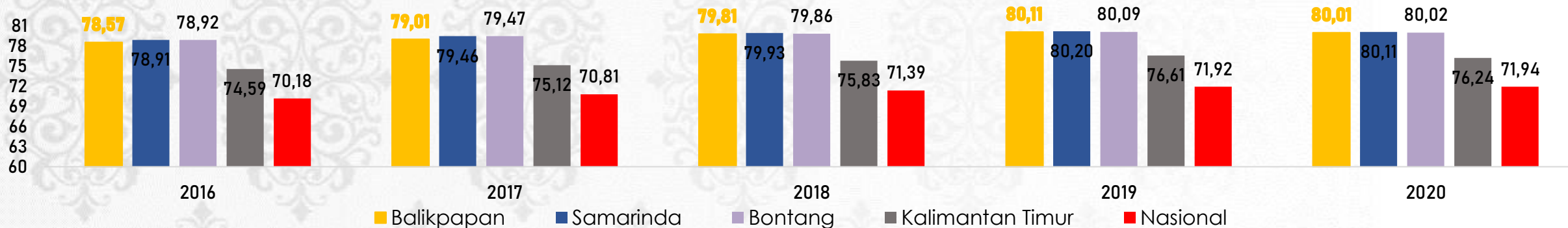
Indeks Gini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018 dari 0,302 menjadi 0,311 di Tahun 2020, namun masih berada di bawah indeks Provinsi dan Nasional.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



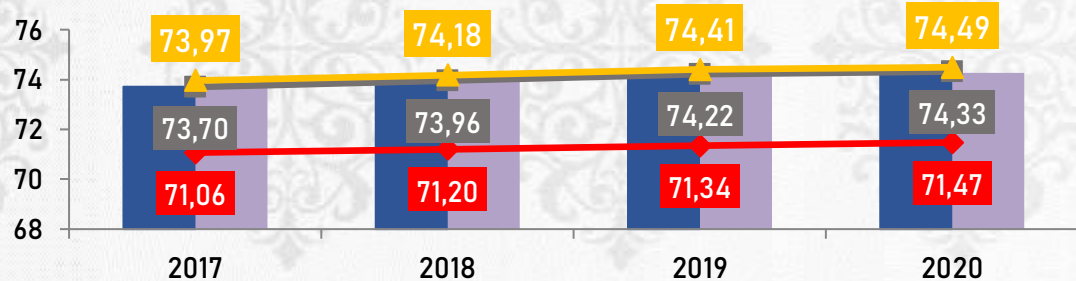
- Tingginya angka TPT pada tahun 2017, salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya nilai investasi.
- Seiring dengan meningkatkan investasi dan pengembangan Industri Kreatif sehingga pada tahun 2019 mampu menurunkan tingkat pengangguran pada tingkat 7,29% meskipun masih berada di atas rata-rata nasional dan provinsi.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

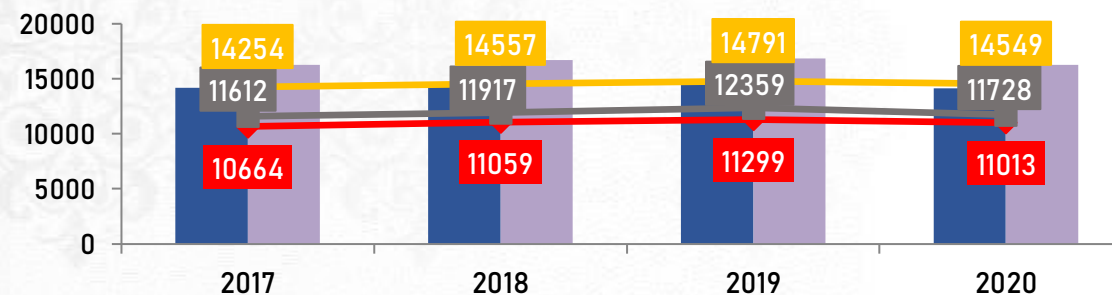


KOMPONEN PEMBENTUK IPM

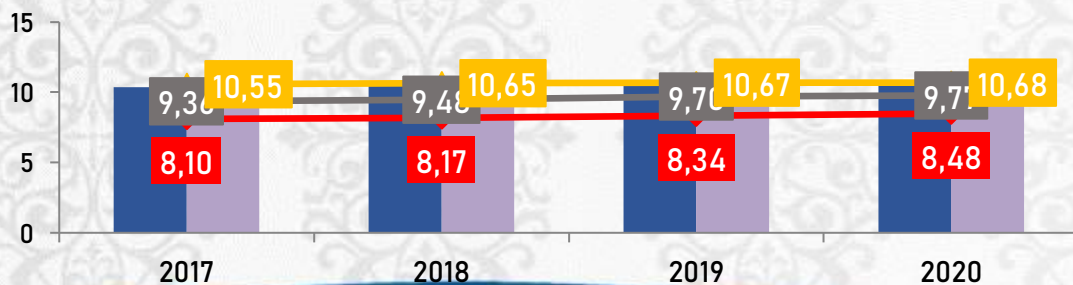
USIA HARAPAN HIDUP



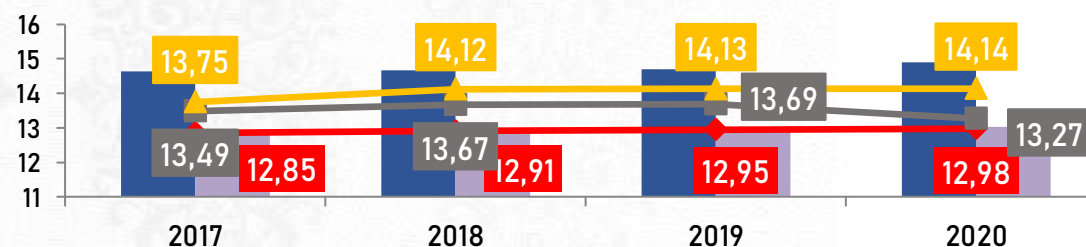
PENGELUARAN PER KAPITA



RATA RATA LAMA SEKOLAH



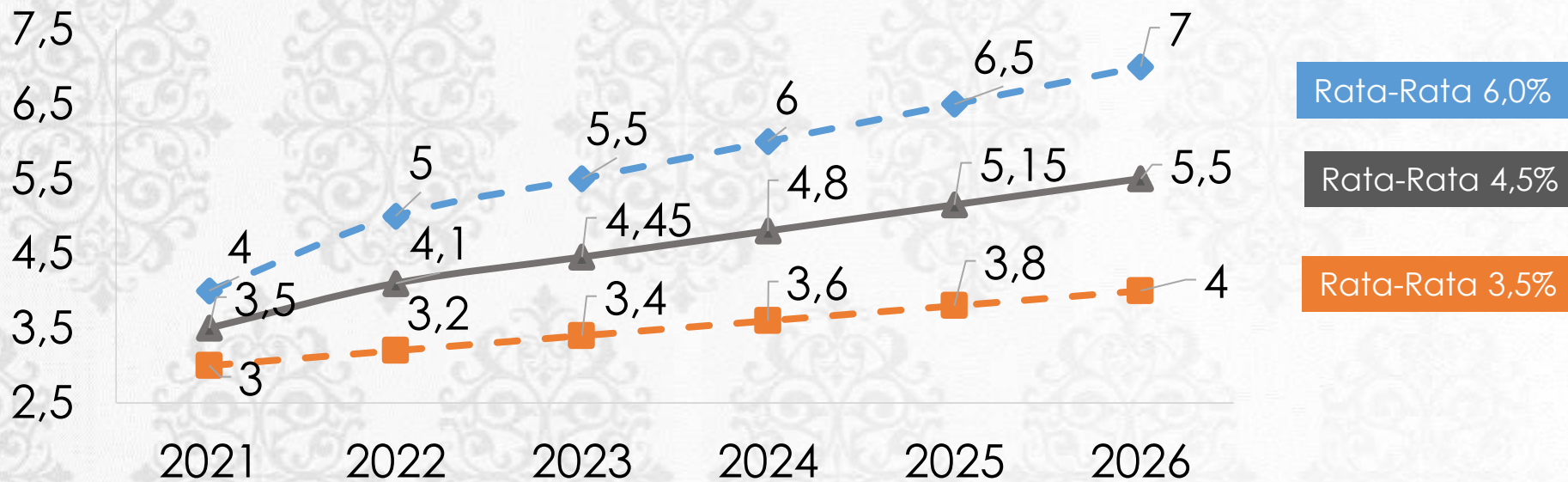
HARAPAN LAMA SEKOLAH





GAMBARAN KEUANGAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021-2026



Target Nasional:
5,7 – 6,0

Target Provinsi:
3,5±1

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FAKTOR PENDORONG	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi RDMP Vaksinasi Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> Puncak Konstruksi RDMP Pembangunan Akses IKN Menguatnya Permintaan Domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Investasi RDMP Pembangunan Kawasan Inti IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan Kapasitas Industri pengolahan Pembangunan Kawasan Inti IKN Pembangunan Kawasan Industri kariangau 	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan Kapasitas Industri pengolahan Pembangunan Kawasan Inti IKN Pembangunan Kawasan Industri kariangau 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Kawasan Inti IKN Pembangunan Kawasan Industri kariangau
TANTANGAN	<ul style="list-style-type: none"> PPKM Darurat mengakibatkan turunnya permintaan minyak hasil olahan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakpastian akhir Pandemi/mutasi virus Jadwal Maintenance Kilang 	<ul style="list-style-type: none"> Berakhirnya Proyek Strategis Utama (konstruksi RDMP) Natural Declining Hulu Migas 	<ul style="list-style-type: none"> Berakhirnya Proyek Strategis Utama (konstruksi RDMP) Natural Declining Hulu Migas Stabilitas Politik Pemilu Serentak Jadwal Maintenance Kilang 	<ul style="list-style-type: none"> Natural Declining Hulu Migas Ketidakpastian Harga Komoditi Batubara dan CPO 	<ul style="list-style-type: none"> Natural Declining Hulu Migas Ketidakpastian Harga Komoditi Batubara dan CPO



RPJMD KOTA BALIKPAPAN



TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD 2021-2026



Keterangan Tambahan :

- Yang dimaksud Hari adalah Hari Kerja (Ketentuan Umum Permendagri 86/2017)
- Wali Kota Balikpapan dilantik pada tanggal 31 Mei 2021, sehingga batas akhir penetapan Perda RPJMD adalah 30 November 2021

KESELARASAN RPJMN 2020-2024, P-RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2021-2026



7 AGENDA PEMBANGUNAN

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

7 AGENDA PEMBANGUNAN

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi
3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan
4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat – pusat produksi
5. Peningkatan ketahanan sumber daya air, energi, dan daya dukung lingkungan hidup
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah
7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19

9 PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Birokrasi Pemerintahan
2. Pendidikan dan Kesehatan
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Air Minum
5. Banjir
6. Nyaman Lingkungan dan Sosial
7. Balikpapan Kota Mice dan Wisata
8. Balikpapan Kota Kreatif
9. Revitalisasi Perusda

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



AKAR PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN PROGRAM

01

PENDIDIKAN

- Keterbatasan formasi penerimaan ASN khususnya tenaga pendidik.
- Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/ Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat
- Masih rendahnya kompetensi guru khususnya dibidang Teknologi Informatika
- Cakupan Ketersediaan Sarana Pendidikan
- Belum sesuai Rasio Jumlah Guru ASN dengan Jumlah Siswa
- Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat
- Peningkatan daya tampung sekolah eksisting, melalui penambahan jumlah RKB
- Pemenuhan Daya Tampung Sekolah Negeri 75% dan Sekolah Swasta 25%
- Masih rendahnya tingkat aktivitas sekolah untuk melakukan update data pada sistem DAPODIK.
- Kondisi Pancemi sangat berpengaruh pada pendapatan orang tua, sehingga orang tua lebih memilih pendidikan negeri
- Keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

02

KESEHATAN

- Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Ibu Hamil
- Masih terhambatnya Upaya Penanganan Medis terhadap Ibu Hamil
- Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Angka Kematian Bayi
- Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Bayi
- Masih Kurangnya jumlah SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
- Belum Meratanya Penyebaran SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
- Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
- Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum Sesuai dengan Standar Aturan yang Berlaku
- Terbatasnya sarana prasarana kesehatan
- Masih Rendahnya Penerapan Pola Hidup Sehat di Masyarakat
- Masih Tingginya Angka Penyakit Menular
- Belum Optimalnya Upaya Penanganan Penyakit Menular

03

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. PEKERJAAN UMUM

- Belum Optimalnya Pengelolaan Data Jalan dan Belum Tersusunnya Rencana Pemeliharaan Jalan
- Belum terhubungnya Pusat Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kota dengan Jaringan Jalan seperti Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Perkotaan Balikpapan Timur
- Belum optimalnya kapasitas saluran drainase dan belum terbangunnya bendungan Pengendali Banjir sesuai dengan Masterplan Drainase
- Belum selesainya pembebasan lahan dan pembangunan Embung Aji Raden dan terbatasnya sumber air baku di Kota Balikpapan
- Keterbatasan air baku dan masih tingginya tingkat kebocoran
- Masih terbatasnya sarana pengolahan air limbah terpusat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang aman
- Terbatasnya lahan TPA Sampah Manggar, TPS 3R belum beroperasi secara optimal, Pengelolaan Sampah di TPA masih belum menggunakan teknologi yang mampu mereduksi volume sampah

2. PENATAAN RUANG

- Masih belum selesainya penyusunan tiga perda yang saat ini sedang diproses
- Belum adanya pembaruan data peta sesuai dengan perubahan terbaru
- Masih adanya pelaksanaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan
- Masih adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat
- Belum Adanya Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan

04

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman belum dipahami secara optimal oleh OPD Pengampu
- Masih terbatasnya data by name by address Rumah Tidak Layak Huni dan tidak lengkapnya readiness criteria terutama mengenai permasalahan legalitas lahan
- Hunian yang tersedia belum menjangkau secara merata baik dari sisi persebaran maupun kemampuan masyarakat untuk membeli
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mengindikasikan kawasan kumuh (jalan dan drainase lingkungan, air minum, air limbah, keteraturan bangunan, dll)
- Sebagian besar kondisi PSU tidak layak untuk dilakukan serah terima pengelolaan selain banyak perumahan yang sudah tidak ada lagi developer selaku pengelola PSU

AKAR PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN

05

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SATPOLPP

- Belum idealnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019
- Belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati regulasi daerah
- Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan regulasi daerah
- Belum idealnya jumlah personel Satpol PP jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
- Bertambahnya beban terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
- Masih kurangnya jumlah petugas Linmas sehingga mempengaruhi fungsi Linmas.

2. BPBD

- Kurangnya jumlah mobil operasional kebakaran sesuai dengan Standar Nasional
- Belum optimalnya tingkat tanggap waktu kebakaran
- Belum optimalnya upaya peningkatan SDM
- Masih rendahnya area cakupan pelayanan kebakaran
- Proyek pemindahan IKN berpotensi akan menambah jumlah cakupan pelayanan kebakaran
- Kasus kebakaran masih banyak terjadi di wilayah kumuh

06

SOSIAL

- Belum optimalnya penanganan penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
- Belum optimalnya pembinaan terhadap potensi sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)
- Belum tersedianya rumah/tempat yang representatif untuk melaksanakan rehabilitasi sosial
- kurangnya minat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk mendapatkan peningkatan keterampilan
- Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Belum adanya regulasi terkait proses pendataan dan verifikasi DTKS
- Masih belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar-OPD
- Belum adanya regulasi yang mengatur kelembagaan dan Fungsi SLRT

07

TENAGA KERJA

- Keterbatasan lapangan kerja disertai dengan meningkatnya pencari kerja
- Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja
- Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja
- Kurangnya Pembinaan terhadap Calon Tenaga Kerja yang Ingin Berwirausaha
- Belum Tersusunnya Masterplan Ketenagakerjaan
- Belum adanya kajian terkait dampak pemindahan IKN
- Belum Adanya Regulasi (Perwal) Terkait dengan Pemberian Sanksi Kepada Perusahaan yang Melanggar Perda
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pemetaan Angkatan Kerja
- Penanganan kasus hubungan industrial masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan

08

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif masih rendah
- Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan
- Pemahaman OPD terhadap PUG masih rendah
- Belum adanya data terpilah
- Peran kelembagaan PUG baik tingkat kota maupun OPD belum maksimal
- Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kinerja OPD yang sangat berkaitan dengan peran lintas sektor OPD lain, dan atau para lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)
- OPD belum optimal melibatkan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta stakeholder lainnya dalam hal pemenuhan hak anak.

AKAR PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN

09

PANGAN

- Belum optimalnya upaya penguatan pola konsumsi masyarakat yang berimbang/beragam
- Persentase cadangan pangan masyarakat mengalami trend penurunan
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Daerah
- Belum adanya pemetaan daerah rawan pangan di Kota Balikpapan

11

LINGKUNGAN HIDUP

- Kurangnya sumber air
- Permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih
- Pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik yang berizin maupun tidak berizin
- Curah hujan yang tinggi
- Berkurangnya kapasitas drainase
- Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN
- Sedimentasi
- Tekanan jumlah penduduk
- Usaha ilegal di daerah aliran sungai
- Limbah cair domestik
- Pembukaan lahan dan pengupasan lahan yang dilakukan pengembang tidak sesuai dengan aturan
- Terjadinya Bencana Tanah Longsor
- Kerusakan mangrove
- Masih belum optimalnya pembebasan hutan lindung dan hutan kota yang ada di wilayah Kota Balikpapan.
- Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah
- Belum tersedianya pusat daur ulang
- Kurangnya sebaran dan jumlah bank sampah
- Kurangnya fasilitas pemerintah untuk angkutan sampah terpilah
- Pertumbuhan penduduk mengakibatkan sampah B3 Rumah Tangga meningkat
- Belum ada regulasi untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah B3 rumah tangga
- Belum tersedianya fasilitas pemerintah kota untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga
- Kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dan sungai
- Kurangnya sarana untuk pengambilan sampah dari aliran air
- Beralihnya kewenangan pengaturan wilayah pesisir dan perairan
- Pengupasan lahan tidak terkendali
- Peningkatan emisi kegiatan industri
- Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor

12

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Administrasi Kependudukan
- Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat dalam Memanfaatkan/Menggunakan Pelayanan Daring
- Adanya perubahan aturan terkait administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat
- masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian dalam pengurusan dokumen penting

10

PERTANAHAN

- Masih banyaknya IMTN yang bermasalah dan persyaratan yang belum lengkap
- Permintaan IMTN melonjak akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
- Masih belum rampungnya pengadaan lahan untuk Pembangunan Bendungan Teritip
- Masih terhambatnya pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)
- Belum optimalnya pengerjaan proyek pelebaran Jalan Letjend Suprpto
- Belum berlanjutnya pengadaan tanah untuk Embung Aji Raden
- Capaian penanganan sengketa pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017
- Dokumen perencanaan berupa RTRW masih belum sepenuhnya dipatuhi.

13

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Penolakan pemakaian alat KB yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama
- Kurangnya pemahaman wanita usia subur dalam status kawin akan pentingnya pengaturan jarak kelahiran dalam siklus kehidupan perempuan
- Adanya biaya tindakan layanan kesehatan yang dibebankan kepada Peserta KB bukan peserta BPJS Kesehatan
- Masih Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan
- Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor Migrasi

AKAR PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN

14

PERHUBUNGAN

- Belum optimalnya pengembangan koridor sarana angkutan umum
- Belum optimalnya pengembangan SAUM, manajemen rekayasa lalu lintas, serta pengembangan jaringan jalan kota
- Kurangnya sarana dan prasarana parkir dan belum adanya peraturan pengelolaan parkir
- Terbatasnya anggaran penyediaan perlengkapan jalan

15

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Pengembangan aplikasi belum terintegrasinya secara menyeluruh
- Sistem pengelolaan aduan publik masih belum terpadu satu pintu

16

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- Belum optimalnya akses pinjaman permodalan bagi pelaku UMKM
- Belum optimalnya kerjasama KUMKM dengan toko swalayan untuk promosi produk
- Terbatasnya pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki sertifikat
- Updating data koperasi dan UMKM yang belum rutin dilakukan

17

PENANAMAN MODAL

- Masih tingginya ketergantungan terhadap sektor migas dan pertambangan
- Fluktuasi hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat
- Belum seluruh pelayanan perizinan terintegrasi secara online

18

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Belum tersedianya peraturan serta belum efektifnya implementasi regulasi tentang kepemudaan
- Minimnya jumlah pemuda berprestasi
- Belum adanya arah kebijakan pengembangan keolahragaan
- Belum optimalnya prestasi atlet lokal

19

STATISTIK

- Belum tersusunya daftar data dan pemantapan kelembagaan satu data di tingkat OPD

20

PERSANDIAN

- Belum adanya regulasi tentang tata kelola persandian

21

KEBUDAYAAN

- Sinergisitas antar OPD masih belum maksimal dalam pelaksanaan event
- Belum optimalnya pembinaan dan pendataan terhadap Paguyuban yang ada
- Anggaran yang terbatas
- Lokasi cagar budaya yang berjauhan
- Pelimpahan kewenangan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan di tahun 2018 mengakibatkan kinerjanya belum optimal
- Pandemi Covid-19 yang menghambat pengelolaan cagar budaya

22

PERPUSTAKAAN

- Jumlah pustakawan belum sesuai dengan standar nasional.
- Kompetensi Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan perlu ditingkatkan
- Keterbatasan data dan SDM dalam melakukan pembinaan
- Masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan
- Keterbatasan jumlah buku di perpustakaan
- Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
- Menurunnya jumlah anggota perpustakaan
- Pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca pada tahun 2020 masih belum optimal
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat

23

KEARSIPAN

- Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Arsip
- Belum Dilaksanakannya Peningkatan Kompetensi SDM
- Masih kurangnya jumlah OPD yang tertib terhadap pengelolaan arsip
- Gedung penyimpanan arsip belum memadai
- Belum optimalnya upaya pengembangan digitalisasi arsip
- Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan pengelolaan kearsipan

AKAR PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN

24

PERIKANAN

- Faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi tangkapan nelayan, tingginya biaya melaut, meningkatnya harga ikan, kualitas armada nelayan belum memadai
- Belum optimalnya aktivitas budidaya perikanan
- Sarana prasarana tambak dan ketersediaan benih ikan yang tidak memadai

25

PARIWISATA DAN EKRAF

- Penurunan jumlah kunjungan wisatawan selama pandemi covid-19
- Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata
- Belum optimal kualitas sarana dan prasarana di tempat pariwisata
- Belum adanya arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif

26

PERTANIAN

- Status kepemilikan lahan pertanian yang bukan milik sendiri
- Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian
- Produksi padi ladang dan padi sawah mengalami penurunan
- Luas tanam dan tanaman padi sawah dan padi ladang terus berkurang
- Fluktuasi produksi tanaman perkebunan
- Fluktuasi produksi peternakan

27

PERDAGANGAN

- Penurunan persentase pelaku usaha menjual produk sesuai dengan standar
- Ketergantungan kebutuhan barang pokok dengan daerah pemasok luar Balikpapan
- Menurunnya persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang di masa pandemi covid-19
- Jumlah Pasar Berklasifikasi A masih rendah
- Penurunan nilai ekspor selama pandemi covid-19

28

PERINDUSTRIAN

- Bahan baku sulit untuk didapatkan
- Perkembangan sektor perindustrian cenderung stagnan selama pandemi covid-19

29

KEUANGAN

- Masih dominannya kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kota Balikpapan yang bertumpu pada dana pusat/fiskal pusat sebesar 71,28%
- Menurunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam masa pandemic Covid-19 (masalah khusus yang terjadi pada tahun 2020)

30

KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN & PELATIHAN

- Adanya perbedaan aturan terkait penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
- Masih terdapatnya Pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan
- Masih Kurangnya Perencanaan Kebutuhan ASN
- Masih belum optimalnya sistem merit dilihat dari unsur penilaiannya
- Upaya pengembangan SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh ASN
- Pengembangan aplikasi daring untuk diklat masih dalam tahap proses pengembangan
- Proses integrasi data masih dalam tahap proses
- Belum optimalnya SDM yang ada terkait integrasi data

31

PENGAWASAN

- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Belum Optimal
- Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) saat ini sudah berada di level 3
- Penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara efektif
- Capaian OPD pada penilaian SAKIP yang masih perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya proses audit kepada OPD
- Fasilitas dan Sarana Prasarana belum sepenuhnya mendukung proses audit
- Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala pada aspek tertentu
- Masih kurangnya komitmen OPD dalam mewujudkan unit kerja yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Masih rendahnya implementasi budaya integritas

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

01. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih perlu dioptimalkan

dipengaruhi rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah

02. Struktur Ekonomi Kota Balikpapan Belum Mendukung Transformasi Ekonomi Secara Optimal

didominasi oleh industri pengolahan migas

03. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

pengangguran karena terdampak Pandemi Covid-19

04. Peningkatan Kemiskinan

Peningkatan terjadi karena terdampak Pandemi Covid-19



05. Kepuasan Layanan Infrastruktur

masyarakat Kota Balikpapan belum dapat mengakses seutuhnya sarana sanitasi yang baik, penanganan Banjir belum optimal

06. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup

ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tahun 2020 masih dibawah nasional dan Provinsi

07. Indeks Pembangunan Berbasis Gender

IPG di tahun 2020 mengalami penurunan sehingga memerlukan perhatian lebih

08. Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKJIP belum mencapai target di tahun 2019 dan di akhir RPJMD

09. Kinerja Pelayanan Air Minum/Air Bersih Masih Rendah

Aktifitas penduduk Kota Balikpapan terkait konsumsi air minum masih belum seluruhnya menggunakan jasa PDAM

ISU STRATEGIS INTERNASIONAL, NASIONAL DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- a. RPJMN 2020-2024
- b. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur
- c. Bonus Demografi

NASIONAL

ISU STRATEGIS

INTERNASIONAL

PROVINSI

- a. Sustainable Development Goals (SDGs)
- b. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- c. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
- d. Pandemi Covid-19

- a. Peningkatan daya saing SDM
- b. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal
- c. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan
- d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
- e. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- f. Pembangunan Ibukota Negara (IKN)
- g. Reformasi Struktural menuju Tata Normal Baru Pasca COVID-19

ISU STRATEGIS KOTA BALIKPAPAN



ANALISA IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL KOTA BALIKPAPAN

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ditunjukkan dengan IPM yang berada di atas rata-rata nasional.
2. Ketersediaan fasilitas pendidikan khususnya keberadaan ITK untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia serta riset dan teknologi.
3. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan sebagai Kota Bebas Tambang Batu Bara, Pengelolaan Kawasan Lindung serta Pengelolaan Persampahan untuk mendukung Balikpapan Nyaman Dihuni.
4. Ketersediaan fasilitas untuk mendukung Kegiatan MICE.
5. Keberadaan kawasan industri untuk memperkuat perekonomian makro Kota Balikpapan.

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural akibat pandemi Covid-19
2. Tingginya migrasi netto, mempercepat pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan layanan dasar dan meningkatkan ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat alih fungsi lahan.
3. Perubahan rantai pasok secara regional untuk mendukung optimalisasi hilirisasi industri.
4. Pengelolaan lingkungan hidup untuk antisipasi dampak perubahan iklim



1. Rendahnya inovasi dan kreatifitas akibat dominasi sektor Migas dan Batu Bara secara regional.
2. Belum meratanya akses layanan dasar serta tenaga Pendidikan dan Kesehatan.
3. Keterbatasan keahlian dan kualifikasi pendidikan pencari kerja.
4. Elastisitas inflasi yang cukup tinggi karena ketergantungan penyediaan bahan pokok terhadap daerah pemasok. Belum tersedianya air bersih secara kontinyu dan dengan kualitas memadai.
6. Belum adanya Sarana dan prasarana wisata seperti aksesibilitas, akomodasi dan penunjang lainnya masih harus dibenahi.

1. Kota Balikpapan terletak di tengah jaringan transportasi darat Trans Kalimantan serta merupakan lintas Trans Nasional (berada pada Jalur ALKI II).
2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan berperan sebagai Pintu Gerbang dengan keberadaan Pelabuhan dan Bandara Internasional.
3. Perkembangan teknologi informasi dan SMART CITY untuk mendukung transformasi ekonomi dan pelayanan publik.
4. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan daya saing Kota Balikpapan.

ANALISA IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL KOTA BALIKPAPAN



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN



VISI DAN MISI KOTA BALIKPAPAN

VISI RPJPD 2005-2025

MEWUJUDKAN KOTABALIKPAPAN SEBAGAI KOTA5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

VISI RPJMD 2021-2026

TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

MISI RPJMD 2021-2026



MISI 1:

MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN
TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK



MISI 2:

MEWUJUDKAN
SUMBER DAYA
MANUSIA YANG
BERKUALITAS
TINGGI



MISI 3:

MENYEDIAKAN
INFRASTRUKTUR
KOTA YANG
MEMADAI



MISI 4:

MEWUJUDKAN KOTA
NYAMAN DIHUNI
YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN



MISI 5:

MENGEMBANGKAN
EKONOMI
KERAKYATAN YANG
KREATIF

TEMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJMD 2021-2026



FOKUS PEMBANGUNAN

Penguatan Sistem Kesehatan dalam rangka percepatan pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Percepatan Ekonomi Daerah dan Infrastruktur untuk Pemerataan Akses Pelayanan Dasar

Perluasan Infrastruktur dan Pembangunan SDM untuk mendukung Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM dan Infrastruktur untuk Pengembangan investasi, industri, dan Pariwisata dalam rangka peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan SDM dan Pemerataan Ekonomi menuju Masyarakat Mandiri dan Modern

TUJUAN DAN SASARAN

MISI 1 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TUJUAN	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi						
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Reformasi Birokrasi						
SASARAN	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel				Menciptakan aparatur Birokrasi yang Kapabel	
INDIKATOR SASARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SAKIP	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Indeks SPBE	Maturitas SPIP	Indeks Profesionalitas ASN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 1 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik					
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
			Indeks SPBE	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Maturitas SPIP	Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
		Menciptakan aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif

TUJUAN DAN SASARAN

MISI 2 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI

TUJUAN	Meningkatnya sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing					
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pembangunan Manusia					
SASARAN	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan Gender	Meningkatnya kualitas pemuda	Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persentase Anggaran Responsif Gender	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Warisan Budaya

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 2 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi					
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan Perluasan bantuan biaya pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan Perluasan bantuan biaya kesehatan
		Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembangkan sistem e-library
		Meningkatnya kualitas pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
		Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah	Indeks Warisan Budaya	Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan	Meningkatkan kualitas SDM pengelola kebudayaan Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat
		Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak

TUJUAN DAN SASARAN

MISI 3 MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI

TUJUAN

Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

INDIKATOR
TUJUAN

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

SASARAN

Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas

INDIKATOR
SASARAN

Indeks Pembangunan Infrastruktur

Rasio permukiman layak huni

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 3 MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.					
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi
			Rasio permukiman layak huni	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Mengembangkan layanan air minum dan air limbah Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan

TUJUAN DAN SASARAN

MISI 4 MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN

Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

**INDIKATOR
TUJUAN**

Indeks Liveable City

SASARAN

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota

**INDIKATOR
SASARAN**

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Presentase
pemanfaatan tanah
yang sesuai dengan
peruntukkan

Indeks Kapasitas
Daerah

Indeks Ketentraman dan
Ketertiban

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 4 MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan						
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Livable City Index	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	
			Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan	Meningkatkan kualitas ruang kota	Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan Meningkatkan nilai estetika ruang kota	
		Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota	Indeks Kapasitas Daerah	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana	Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas
					Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana	
					Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda	
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi	Penyelenggaraan penegakkan perda yang humanis	

TUJUAN DAN SASARAN

MISI 5 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF

TUJUAN	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Gini			Pertumbuhan Ekonomi				
SASARAN	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah , penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan			Meningkatnya Angka Investasi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
INDIKATOR SASARAN	Presentase Pertumbuhan UMKM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Kemiskinan	Nilai Investasi	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Angka kunjungan wisatawan	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 5 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF


Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif					
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Angka Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang mempermudah Investasi Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional	Angka kunjungan wisatawan (dalam Juta orang)	Meningkatkan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif



**PROGRAM
PEMBANGUNAN
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026**

MISI 1 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Sasaran I: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan



NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
3	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
4	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	KECAMATAN
7	Program Administrasi Umum Sekretariat Dprd Kabupaten/Kota	SETWAN
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	SETWAN

Sasaran II: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSKOT
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSKOT
5	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDALITBANG
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDALITBANG
7	Program Penelitian Dan Pengembangan	BAPPEDALITBANG
8	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
9	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
10	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SETDAKOT
13	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDAKOT
14	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDAKOT
15	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BP2DRD
16	Program pelayanan penanaman modal	DPMPT

Sasaran III: Menciptakan aparatur Birokrasi yang Kapabel

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

MISI 2 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI

Sasaran I: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
2	Program Pengembangan Kurikulum	DISDIKBUD
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIKBUD

Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES

Sasaran III: Meningkatnya kualitas literasi masyarakat

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pembinaan Perpustakaan	DISPUTAKAR
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	DISPUTAKAR
3	Program Pengelolaan Arsip	DISPUTAKAR
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	DISPUTAKAR
5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	DISPUTAKAR

Sasaran IV: Meningkatnya kualitas pemuda

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DPOP
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DPOP
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DPOP

Sasaran V: Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	DISDIKBUD
2	Program Pengembangan Kebudayaan	DISDIKBUD
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISDIKBUD
4	Program Pembinaan Sejarah	DISDIKBUD
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISDIKBUD
6	Program Pengelolaan Permuseuman	DISDIKBUD

Sasaran VI: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DP3AKB
2	Program Pengendalian Penduduk	DP3AKB
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DP3AKB
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DP3AKB
5	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AKB
6	Program Perlindungan Perempuan	DP3AKB
7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AKB
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DP3AKB
9	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DP3AKB
10	Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AKB

MISI 3 MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI

SASARAN: MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG TERPADU DAN BERKUALITAS		
NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Penyelenggaraan Jalan	DPU
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPU
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPU
4	Program Penataan Bangunan Gedung	DPU
5	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPU
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPU
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPU
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
9	Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
10	Program Pengembangan Permukiman	DISPERKIM
11	Program Pengembangan Perumahan	DISPERKIM
12	Program Kawasan Permukiman	DISPERKIM
13	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DISPERKIM
15	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DISPERKIM

MISI 4 MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLH
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPPR
11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DPPR
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	DPPR
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPPR
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DPPR
15	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	DPPR
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPU

Sasaran II: Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DP3AKB
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	KESBANGPOL
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik	KESBANGPOL
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KESBANGPOL
7	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	KESBANGPOL
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL

MISI 5 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF

Sasaran I: Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah , penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DKUMKMP
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DKUMKMP
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DKUMKMP
4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	DKUMKMP
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DKUMKMP
6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	DKUMKMP
7	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp	DKUMKMP
8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DKUMKMP
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	DKUMKMP
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	DKUMKMP
11	Program Pengembangan Umkm	DKUMKMP
12	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
13	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
14	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
15	Program Penanganan Bencana	DINSOS
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOS
17	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISNAKER
18	Program Hubungan Industrial	DISNAKER
19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER
20	Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKER

Sasaran II : Meningkatnya Angka Investasi

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPT
2	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPT
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPT

Sasaran III: Meningkatnya Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DP3
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DP3
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DP3
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DP3
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DP3
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DP3
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DP3
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DP3
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	DP3
10	Program Penyuluhan Pertanian	DP3
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DP3
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DP3
13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	DP3
14	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DP3

Sasaran IV: Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DPOP
2	Program Pemasaran Pariwisata	DPOP

Sasaran V: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DPOP
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DPOP

Sasaran VI: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah

NO	PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	DISDAG
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISDAG
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DISDAG
4	Program Pengembangan Ekspor	DISDAG
5	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	DISDAG
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DISDAG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH





MISI 1 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Indeks Reformasi Birokrasi	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
	67,33	68,17	68,70	69,06	69,70	70,04
Sasaran I: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel						
Nilai SAKIP	68,68	75,50	75,52	75,54	75,56	75,58
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	79	80	81	82	83
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	41,50%	42,08%	42,66%	43,24%	44,40%
Indeks SPBE	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0
Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
Sasaran II: Menciptakan aparatur Birokrasi yang Kapabel						
Indeks Profesionalitas ASN	47,87	52,5	53	53,5	54	54,5
Sasaran III: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan						
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05

MISI 2 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI



Indeks Pembangunan Manusia	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
	80,01	80,11	80,31	80,51	80,71	80,91
Sasaran I: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan						
Indeks Pendidikan	0,748	0,755	0,762	0,769	0,777	0,784
Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat						
Indeks Kesehatan	0,838	0,838	0,839	0,839	0,839	0,840
Sasaran III: Meningkatnya kualitas literasi masyarakat						
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50
Sasaran IV: Meningkatnya kualitas pemuda						
Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025
Sasaran V: Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah						
Indeks Warisan Budaya	0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975
Sasaran VI: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender						
Persentase Anggaran Responsif Gender	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%

MISI 3 MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI



Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
82,03	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00

Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,80	78,20	78,78	79,12	79,55	80,02
Rasio permukiman layak huni	98,60	98,86	99,13	99,39	99,66	100

MISI 4 MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN



Indeks Liveable City

2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
81,69	81,69	82,19	82,69	83,19	83,69

Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51
Presentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%	86,00%	86,50%

Sasaran II: Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota

Indeks Kapasitas Daerah	N/A	0,67	0,70	0,73	0,75	0,77
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,2520	0,4000	0,4100	0,4200	0,4300	0,435

MISI 5 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF

 Indeks Gini	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
		0,311	0,300	0,300	0,300	0,300

Sasaran I: Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah , penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan

Presentase Pertumbuhan UMKM	35,78%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,00	8,70	8,46	8,22	7,98	7,74
Tingkat Kemiskinan	2,57	2,40	2,39	2,38	2,37	2,36

Pertumbuhan Ekonomi	2020 (BASELINE)	2022	2023	2024	2025	2026
		-0,69%	4,1%	4,45%	4,8%	5,15%

Sasaran: Meningkatnya Angka Investasi

Nilai Investasi (Rp)	14,3T(*)	3,36T	3,60T	3,88T	4,23T	4,66T
----------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan	87	86	87	88	89	90
--------------------------	----	----	----	----	----	----

Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional

Angka kunjungan wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,50	2,30	2,50	2,70	3,00
--	------	------	------	------	------	------

Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif

Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah

Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------



Terima Kasih

